

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS DPUPR TAHUN 2019 – 2024 KABUPATEN TEGAL



**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PEKERJAAN UMUM**

Jl. Cut Nyak Dien No 13 Kalisapu, Slawi 52416
Telp. (0283) 6197673 Fax. (0283) 6197503



KATA PENGANTAR

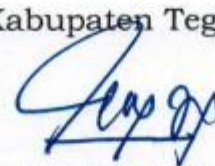
Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga dokumen Perubahan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 dapat tersusun, sebagai penjabaran prioritas pembangunan Kabupaten Tegal yang merupakan bagian tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tegal, lebih lanjut dijabarkan dalam dokumen yang memuat rencana program dan kegiatan, serta indikasi alokasi pendanaannya selama 3 (tiga) tahun.

Perubahan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal dalam mewujudkan pembangunan daerah Kabupaten Tegal yang berkelanjutan sebagai akselerasi percepatan program yang ada di dalam Dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Tegal serta amanat Reformasi Birokrasi.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa me-Ridhoi kita semua dalam mewujudkan kesejahteraan untuk masyarakat Kabupaten Tegal, sesuai dengan Visi Pemerintah Kabupaten Tegal yakni “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tegal yang Sejahtera, Mandiri, Unggul, Berbudaya dan Berakhlak Mulia”.

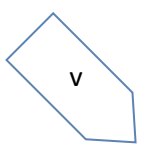
Slawi, Juni 2021

Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Tegal



Ir. HERY SUHARTONO, M.M.

Pembina Utama Muda
NIP. 19630615 199401 1 001



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	6
1.3 Maksud Dan Tujuan	8
1.4 Sistematika Penulisan	9
BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	11
2.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi	11
2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi	11
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	22
2.2.1 Sumber Daya Manusia (SDM)	22
2.2.2 Sarana dan Prasarana	26
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	30
2.3.1 Infrastruktur Jalan	30
2.3.2 Infrastruktur Jembatan	31
2.3.3 Infrastruktur Drainase.....	32
2.3.4 Infrastuktur Sumber Daya Air	32
2.3.5 Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	33
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	48
2.4.1 Tantangan	48
2.4.2 Peluang	49
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	50
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	50

3.2	Telaahan Visi dan Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	53
3.2.1	Visi dan Misi	53
3.3	Telaahan Renstra K/L dan Renstra Strategis Provinsi	57
3.3.1	Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.....	57
3.3.2	Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Renstra DLH Provinsi Jawa Tengah	60
3.3.2.1	Telaahan Renstra Kemeterian LHK.....	60
3.3.3	Telaah Renstra pada Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah.....	63
3.3.3.1	Kondisi, Potensi dan Permasalahan Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah	63
3.3.3.2	Tujuan dan Sasaran	64
3.3.4	Telaah Renstra pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah.....	65
3.3.5	Telaahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah	68
3.4	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD Kab. Tegal.....	70
3.4.1	Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal	70
3.5	Penentuan Isu-Isu Strategis	76
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	78
4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	78
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	86
5.1	Strategi.....	86
5.2	Pengarusutamaan dalam Pembangunan	86
5.3	Kebijakan.....	87
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN....	89
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	146
BAB VIII	PENUTUP	150



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Diagram Alur Tahapan Penyusunan Renstra DPU 4

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Struktur Organisasi	21
Tabel 2.2	Jumlah Pegawai DPU Menurut Golongan Per Bulan Desember 2020.....	22
Tabel 2.3	Jumlah Pegawai DPU Menurut Tingkat Pendidikan Per Bulan Desember 2020	23
Tabel 2.4	Jumlah Pegawai DPU Menurut Agama Per Bulan Desember 2020.....	24
Tabel 2.5	Jumlah Pegawai DPU Menurut Usia Per Bulan Desember 2020.....	25
Tabel 2.6	Pencapaian Kinerja Pembangunan Jalan Kabupaten Selama Kurun Waktu 2015 – 2019.....	30
Tabel 2.7	Pencapaian Kinerja Pembangunan Jembatan Kabupaten Selama Kurun Waktu 2015 – 2019	31
Tabel 2.8	Pencapaian Kinerja Pembangunan Drainase Jalan Kabupaten Selama Kurun Waktu 2016 – 2020.....	32
Tabel 2.9	Pencapaian Kinerja Pembangunan Irigasi Kabupaten Selama Kurun Waktu 2014 – 2019.....	32
Tabel 2.10	Volume Sampah yang terangkut per hari Tahun 2015 - 2020....	33
Tabel 2.11	Bank Sampah Tahun 2015 - 2020	34
Tabel 2.12	Rasio Tempat Pembuangan Sampah Sementara terhadap Penduduk Tahun 2015 - 2020	34
Tabel 2.13	Kondisi Tempat Pemrosesan Sampah Tahun 2015 - 2020.....	35
Tabel 2.14	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (Renstra Periode 2014 – 2019)	36
Tabel 2.15	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (Renstra Terbatas 2020 – 2024)	39
Tabel 2.16	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2015 – 2019.....	41
Tabel 2.17	Anggaran dan Realisasi (Renstra Terbatas)	44
Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tegal	51
Tabel 3.2	Faktor Penghambat Dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.....	55
Tabel 3.3	Permasalahan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian PUPR beserta	

	Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.....	59
Tabel 3.4	Permasalahan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tegal berdasarkan Sasaran Renstra KLKH beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.....	62
Tabel 3.5	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan terhadap Sasaran Jangka Menengah Renstra Provinsi.....	66
Tabel 3.6	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan terhadap Sasaran Jangka Menengah Renstra DLH dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah	69
Tabel 3.7	Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS pada RPJMD...	72
Tabel 3.8	Tabel Hasil Analisa SWOT.....	74
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal Tahun 2019 – 2024 (Renstra Murni) ...	79
Tabel 4.2	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal Tahun 2019 – 2024 (Renstra Terbatas)	81
Tabel 4.3	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal Tahun 2019 – 2024	83
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal Tahun 2019 - 2024.....	88
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal (Renstra Murni).....	97
Tabel 6.2	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal (Renstra Terbatas).....	112
Tabel 6.3	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal.....	127
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal yang Mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD (Renstra Murni).....	147
Tabel 7.2	Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal yang Mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD (Renstra Terbatas)	148
Tabel 7.2	Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal yang Mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD (Renstra Perubahan).....	149

BAB I


PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, setiap Organisasi Perangkat Daerah harus memiliki Rencana Strategis Perangkat Daerah yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD). Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode lima (5) tahun, yang disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi daerah serta tujuan setiap organisasi pemerintahan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing Organisasi Perangkat Daerah.

Selain disebabkan penyesuaian aturan yang ada berupa Perubahan RPJMD Kabupaten Tegal juga karena diharuskan untuk melakukan akselerasi dan penyesuaian terhadap perubahan RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Tengah yang disebabkan bencana nasional bahkan internasional, yaitu terjadinya Pandemi *Covid-19* yang telah mempengaruhi semua sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bahkan bernegara. Kondisi ini ditunjukkan dengan menurunnya pendapatan daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah terutama pada sektor-sektor yang berkontribusi besar pada ekonomi Kabupaten Tegal. Dampak dari kondisi tersebut adalah alokasi anggaran yang harus di *refocusing* dan direlokasi dalam rangka penanganan *Covid-19* melalui penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi di Kabupaten Tegal.


Mendasari Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019



tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019-2024, maka ditindaklanjuti dengan Perubahan Kedua Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2024. Perubahan Kedua dimaksud meliputi perubahan target indikator kinerja program dan perubahan tolok ukur kinerja kegiatan yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 berdampak pada perubahan pembagian urusan dan kewenangan pemerintah daerah, perubahan bentuk dan susunan perangkat daerah, serta pembagian tugas pokok dan fungsi pada setiap perangkat daerah. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Tegal telah menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal No. 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal dan Peraturan Bupati Tegal Nomor 30 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal, dengan berpedoman kepada amanat dan semangat Reformasi Birokrasi.

Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang mengacu pada perubahan SOTK berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 dan Peraturan Bupati Kabupaten Tegal Nomor 30 Tahun 2021 yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib di bidang Pekerjaan Umum. Renstra menjadi pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan tahunan yang dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) ke depan, dan menjadi tolok ukur dalam melakukan monitoring dan evaluasi pencapaian tujuan, sasaran dan target kinerja yang mengarah pada penilaian capaian IKU.

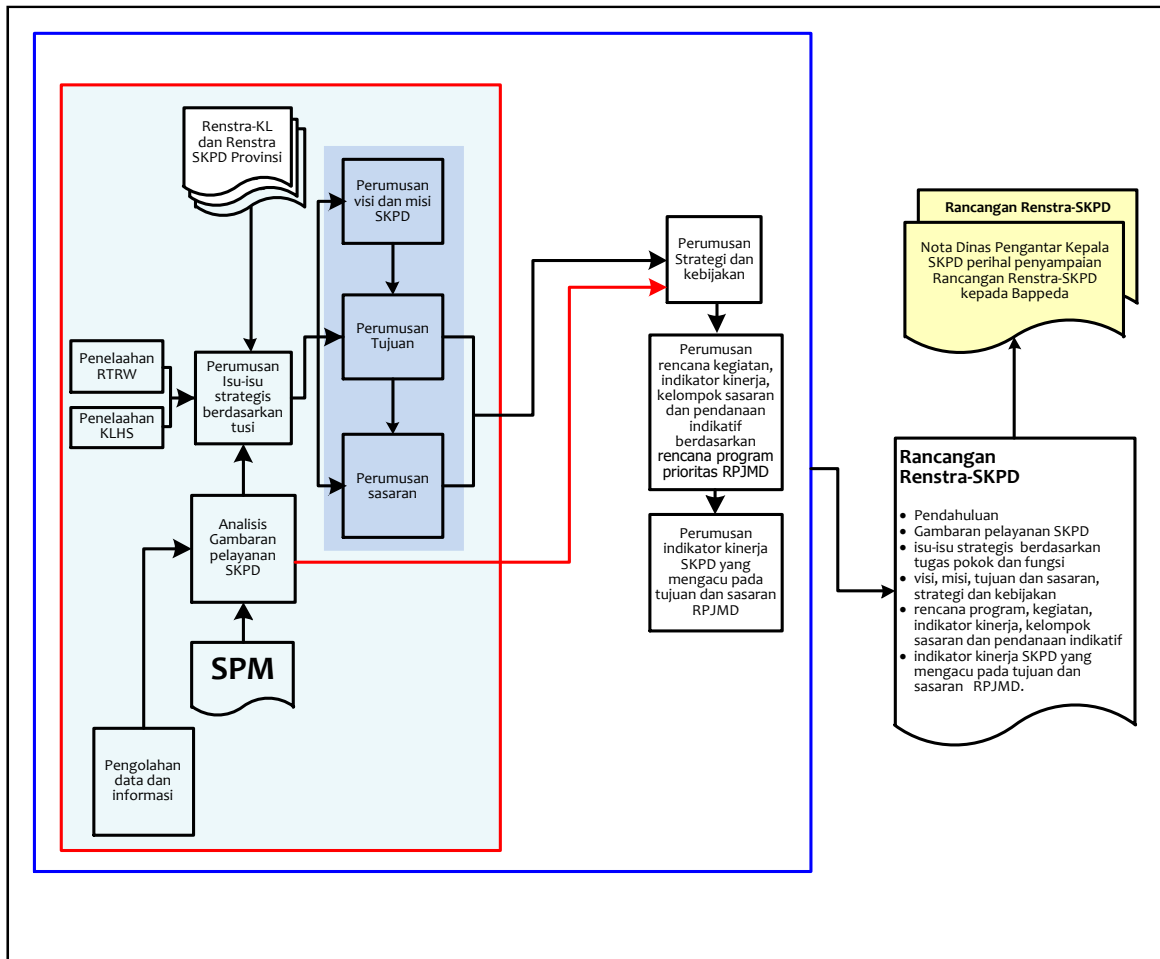


Bersamaan dengan penataan organisasi perangkat daerah, Pemerintah Kabupaten Tegal juga telah merumuskan Indikator Kinerja Utama (IKU). Oleh sebab itu setiap perangkat daerah perlu untuk menginterpretasikan target dan indikator kinerja yang telah tertuang dalam Renstra perangkat daerah, dengan menyesuaikan bentuk dan susunan perangkat daerah yang baru, tugas pokok dan fungsi yang baru, dan perspektif Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan baik pada tingkatan pemerintah daerah maupun perangkat daerah. Interpretasi target dan indikator kinerja tersebut tetap berpedoman dan mengarah pada pencapaian visi dan misi dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024.

Penyusunan Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum telah berpedoman pada Perubahan RPJMD Kabupaten Tegal 2019-2024, mengacu pada RPJPD Kabupaten Tegal 2005-2025, terintegrasi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal 2012-2032, serta memperhatikan hasil evaluasi Renstra pada periode sebelumnya. Selain itu, penyusunan Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal telah dilaksanakan dengan berdasar kepada kondisi dan potensi yang dimiliki Kabupaten Tegal serta dengan mempertimbangkan dinamika perkembangan daerah dan nasional yang dilakukan melalui pendekatan berikut:

1. Pendekatan Teknokratik yaitu menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah
2. Pendekatan Partisipatif yaitu pelibatan sebagai pemangku kepentingan
3. Pendekatan Politis yaitu penerjemahan visi misi Kepala Daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan jangka menengah yang dibahas bersama DPRD
4. Pendekatan atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*), selaras antar Musrenbang Desa – Kecamatan – Kabupaten – Provinsi – Nasional, selaras antar Dokumen Perencanaan

Tahapan penyusunan Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut :



Gambar 1.1 Diagram Alur Tahapan Penyusunan Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal

Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum yang disusun setiap tahun selama kurun waktu tahun 2019–2024, serta menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Dinas Pekerjaan Umum, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja. Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum telah mengacu pada Penelaahan RTRW; Penelaahan KLHS; Renstra K/L; Perumusan Tujuan dan Renstra Provinsi Jawa Tengah.

Penyusunan dokumen Perubahan Renstra juga telah memperhatikan Perumusan Isu strategis berdasarkan Tugas dan Fungsi Analisis Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah, Penelaahan Data dan Informasi Perumusan Sasaran, dan Perumusan Arah Kebijakan Perumusan rencana program dan kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif, serta Perumusan Indikator kinerja Penyelenggaraan Urusan.

Penyusunan Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tegal diharapkan dapat memenuhi fungsi sebagai :

1. Media untuk mengimplementasikan janji Kepala Daerah terpilih di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang telah disampaikan pada saat kampanye kepada seluruh masyarakat sekaligus instrumen untuk mengukur tingkat pencapaian kinerja Kepala Daerah di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selama 5 (lima) tahun.
2. Pedoman pembangunan pada Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selama 3 (tiga) tahun.
3. Pedoman pembangunan dan acuan penjabaran dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
4. Instrumen pengendalian pembangunan pada Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Penyusunan Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tegal 2019-2024 berpedoman pada Perubahan RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024, dengan menyelaraskan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis perangkat daerah di tingkat provinsi dan rencana strategis pemerintah yang terkait untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional. Penyelarasan tersebut diperlukan agar program pembangunan daerah di tingkat kabupaten dapat bersinergi dengan program pembangunan daerah di tingkat provinsi dan pembangunan nasional di tingkat pusat. Analisis terhadap Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal 2019-2024 dilakukan

dalam tahapan penyusunan Perubahan RPJMD untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Perubahan RPJMD Kabupaten Tegal.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dasar hukum yang mendasari penyusunan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tegal Tahun 2019 - 2024 adalah :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025;
6. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes - Tegal - Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 27);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tegal Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 28).
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal Tahun 2012-2032;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 – 2024.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal No. 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan RPJMD Kabupaten 2019-2024;

18. Peraturan Bupati Tegal Nomor 73 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal;
19. Peraturan Bupati Tegal Nomor 30 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tegal adalah dalam rangka penyesuaian dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu 3 (tiga) tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah disertai kerangka pendanaan disebabkan penyesuaian kebijakan pemerintah daerah sebagai akibat Pandemi *Covid-19* sebagai tindak lanjut atas Perubahan RPJMD Kabupaten Tegal 2019-2024.

Tujuan :

Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 adalah:

1. Merumuskan gambaran umum kondisi daerah yang terkait dengan bidang ke-PU-an sebagai dasar perumusan permasalahan dan isu strategis daerah, sebagai dasar prioritas penanganan pembangunan daerah 3 (tiga) tahun ke depan dan sebagai pedoman bagi seluruh bidang dan unit kerja di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Kabupaten Tegal dalam menyusun program dan kegiatan periode 2019-2024;
2. Merumuskan gambaran pengelolaan keuangan serta kerangka pendanaan sebagai dasar penentuan kemampuan kapasitas pendanaan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal 3 (tiga) tahun ke depan;

3. Menerjemahkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tegal ke dalam tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal tahun 2019-2024, yang disertai dengan program prioritas untuk masing-masing bidang dan unit kerja, dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024;
4. Menetapkan berbagai program prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2021-2024;
5. Menetapkan dasar penilaian keberhasilan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal periode 2019 - 2024.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Perubahan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan dan sistematika Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal.

BAB II GAMBARAN PELAYANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan tentang tugas, fungsi, struktur, sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bab ini menguraikan tentang identifikasi permasalahan, telaahan visi misi kepala daerah, telaahan renstra dan



penentuan isu-isu strategis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menguraikan tentang tujuan dan sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menguraikan tentang strategi dan kebijakan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini menguraikan tentang rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini menguraikan Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal yang mengacu pada Sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

Bab ini menguraikan simpulan dan harapan pemanfaatan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal.

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM

Gambaran Kinerja urusan Pekerjaan Umum di Kabupaten Tegal selama kurun waktu 2019 - 2024 dapat dilihat dari aspek Pembangunan Infrastruktur Jalan, Pembangunan Infrastruktur Jembatan dan Pembangunan Infrastruktur Bangunan Sumber Daya Air (SDA) yang digambarkan dijelaskan dalam deskripsi sebagai berikut:

2.1 TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal. Berdasarkan Peraturan Bupati Tegal Nomor 30 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal berkedudukan sebagai unsur penunjang pemerintah daerah di bidang Pekerjaan Umum yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas Pekerjaan Umum yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati Tegal.

2.1.1 Tugas Pokok Dan Fungsi

Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan atau urusan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Pekerjaan Umum yang menjadi tanggung jawab dan wewenangnya berdasarkan Peraturan PerUndang-undangan yang berlaku, secara rinci Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut:

1. **Nama Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum**

Kepala Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang jalan dan jembatan, bidang sumber daya air dan bidang jasa konstruksi.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Dinas Pekerjaan Umum mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang jalan dan jembatan, bidang sumber daya air dan pembinaan jasa konstruksi.;
- b. Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang jalan dan jembatan, bidang sumber daya air dan pembinaan jasa konstruksi.;
- c. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kebijakan di bidang jalan dan jembatan, bidang sumber daya air dan pembinaan jasa konstruksi.;
- d. Pengelolaan dan fasilitasi program dan kegiatan di bidang jalan dan jembatan, bidang sumber daya air dan pembinaan jasa konstruksi.;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang jalan dan jembatan, bidang sumber daya air dan pembinaan jasa konstruksi.;
- f. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang jalan dan jembatan, bidang sumber daya air dan pembinaan jasa konstruksi.;
- g. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati di bidang jalan dan jembatan, bidang sumber daya air dan pembinaan jasa konstruksi.;

2. Nama Jabatan : Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan, penatausahaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum, dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan umum dan teknis kesekretariatan/ ketatausahaan;
- b. pengoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional Dinas;
- c. pengoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas;
- d. penyiapan bahan bimbingan, pengawasan dan pengendalian teknis Dinas;
- e. pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan, penganggaran, dan pelaporan Dinas;
- f. pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum;

- g. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan kesekretariatan;
- h. pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan dan evaluasi penyelenggaraan tugas Dinas.

3. Nama Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi dan Pelaporan

Kepala Sub Bagian Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam penyelenggaraan urusan perencanaan, penganggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja perangkat daerah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Sub Bagian Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi melaksanakan sebagian tugas Sekretaris dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan kegiatan di Sub Bagian, Seksi, dan UPTD.

4. Nama Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan

Kepala Subbagian Keuangan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melakukan pengelolaan keuangan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Subbagian Keuangan mempunyai fungsi :

- a. Penelaahan data/informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- b. Penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional pengelolaan keuangan Dinas;
- c. Pengelolaan keuangan Dinas;
- d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian keuangan;

5. Nama Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melakukan pengelolaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, Aset/BMD, perpustakaan, humas dan protokol, pengelolaan administrasi kepegawaian, kesejahteraan dan pengembangan pegawai.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi melaksanakan sebagian tugas Sekretaris dalam pelaksanaan urusan Umum dan Kepegawaian.

6. Nama Jabatan : Kepala Bidang Jalan dan Jembatan

Kepala Bidang Jalan dan Jembatan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan urusan jalan dan jembatan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Jalan dan jembatan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang jalan dan jembatan;
- b. Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang jalan dan jembatan;
- c. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kebijakan di bidang jalan dan jembatan;
- d. Pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang jalan dan jembatan;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang jalan dan jembatan;
- f. Pelaksanaan administrasi di bidang jalan dan jembatan;
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas di bidang jalan dan jembatan;

7. Nama Jabatan : Kepala Seksi Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan

Kepala Seksi Perencanaan Teknis Jalan dan jembatan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Jalan dan jembatan dalam melakukan perencanaan teknis dan pembuatan spesifikasi teknis urusan jalan dan jembatan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Seksi Perencanaan Teknis Jalan dan jembatan mempunyai fungsi melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Jalan dan jembatan dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di Seksi Perencanaan Teknis Jalan dan jembatan.

8. Nama Jabatan : Kepala Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan

Kepala Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Jalan dan Jembatan dalam melakukan pembangunan dan peningkatan, jalan dan jembatan yang menjadi urusan seksi pembangunan Jalan dan Jembatan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan mempunyai fungsi melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Jalan dan Jembatan dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan.

9. Nama Jabatan : Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Jalan dan Jembatan dalam melakukan pengadaan, pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jalan dan jembatan yang menjadi urusan Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, kepala Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai fungsi melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Jalan dan Jembatan dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di Seksi Pemeliharaan Jalan.

10. Nama Jabatan : Kepala Bidang Sumber Daya Air

Kepala Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perencanaan teknis, pembinaan dan penyuluhan, pembangunan, pemeliharaan, pengawasan dan pengendalian serta survei di bidang sumber daya air.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas :

- a. Perumusan kebijakan di bidang Sumber Daya Air;
- b. Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang Sumber Daya Air;

- c. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kebijakan di bidang Sumber Daya Air ;
- d. Pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang Sumber Daya Air;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang Sumber Daya Air;
- f. Pelaksanaan administrasi di bidang Sumber Daya Air;
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di Bidang Sumber Daya Air;

11. Nama Jabatan : Kepala Seksi Perencanaan Teknis Sumber Daya Air

Kepala Seksi Perencanaan Teknis Sumber Daya Air mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Sumber Daya Air dalam melakukan perencanaan teknis sumber daya air yang menjadi urusan Seksi Perencanaan Teknis Sumber Daya Air.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Seksi Perencanaan Teknis Sumber Daya Air mempunyai fungsi melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Sumber Daya Air dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di Seksi Perencanaan Teknis Sumber Daya Air.

12. Nama Jabatan : Kepala Seksi Pembangunan dan Peningkatan Sumber Daya Air

Kepala Seksi Pembangunan dan Peningkatan Sumber Daya Air mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Sumber Daya Air dalam melakukan pembangunan dan peningkatan Bidang Sumber Daya Air.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Seksi Pembangunan dan Peningkatan Sumber Daya Air mempunyai fungsi melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Sumber Daya Air dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di Seksi Pembangunan dan Peningkatan Sumber Daya Air.

13. Nama Jabatan : Kepala Seksi Eksploitasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air

Kepala Seksi Eksploitasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Sumber Daya Air dalam melakukan program eksploitasi bidang sumber daya air.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Seksi Eksploitasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air mempunyai fungsi melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Sumber Daya Air dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di Seksi Eksploitasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air.

14. Nama Jabatan : Kepala Bidang Jasa Konstruksi

Kepala Bidang Jasa Konstruksi mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam Perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, bina teknik, pendataan dan informasi jasa konstruksi, manajemen konstruksi dan pengawasan jasa konstruksi di Bidang Jasa Konstruksi.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Jasa Konstruksi mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, bina teknik, pendataan dan informasi jasa konstruksi, manajemen konstruksi dan pengawasan jasa konstruksi di Bidang Jasa Konstruksi;
- b. Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, bina teknik, pendataan dan informasi jasa konstruksi, manajemen konstruksi dan pengawasan jasa konstruksi di Bidang Jasa Konstruksi;
- c. Pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di Bidang Jasa Konstruksi;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di Bidang Jasa Konstruksi;
- e. Pelaksanaan administrasi di Bidang Jasa Konstruksi;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di Bidang Jasa Konstruksi;

15. Nama Jabatan : Kepala Seksi Pembinaan Jasa Konstruksi

Kepala Seksi Pembinaan Jasa Konstruksi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Jasa Konstruksi dalam penyelenggaraan urusan Pembinaan Jasa Konstruksi.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Kepala Seksi Pembinaan Jasa Konstruksi mempunyai fungsi melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Jasa Konstruksi, dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian kegiatan di Seksi Pembinaan Jasa Konstruksi.

16. Nama Jabatan : Kepala Seksi Bina Teknik, Pendataan, dan Informasi Jasa Konstruksi

Kepala Seksi Bina Teknik, Pendataan dan Informasi Jasa Konstruksi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Jasa Konstruksi, dalam penyelenggaraan urusan bidang penyusunan Bina Teknik, Pendataan dan Informasi Jasa Konstruksi.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Seksi Bina Teknik, Pendataan dan Informasi Jasa Konstruksi mempunyai fungsi melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Jasa Konstruksi dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di Seksi Bina Teknik, Pendataan dan Informasi Jasa Konstruksi.

17. Nama Jabatan : Kepala Seksi Manajemen Konstruksi dan Pengawasan Jasa Konstruksi

Kepala Seksi Pengawasan dan Manajemen Konstruksi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Jasa Konstruksi dalam penyelenggaraan urusan bidang pengawasan dan manajemen konstruksi.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Kepala Seksi Pengawasan dan Manajemen Konstruksi mempunyai fungsi melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Jasa Konstruksi dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, Pengawasan dan Manajemen

Konstruksi serta pelaporan kegiatan di Seksi Pengawasan dan Manajemen Konstruksi.

18. Nama Jabatan : Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPTD) Pemeliharaan Jalan dan Irigasi Wilayah Kelas A

Kepala UPTD Pemeliharaan Jalan dan Irigasi Wilayah Kelas A mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melakukan pelaksanaan, pembinaan, pengawasan, monitoring, evaluasi, dan pengendalian pemeliharaan jalan dan irigasi di wilayah kerjanya.

1. Wilayah I membawahi wilayah : Kecamatan Kramat, Kecamatan Suradadi, Kecamatan Warureja.
2. Wilayah II membawahi wilayah : Kecamatan Tarub, Kecamatan Talang, Kecamatan Adiwerna, Kecamatan Dukuhturi.
3. Wilayah III membawahi wilayah : Kecamatan Pangkah, Kecamatan Jatinegara, Kecamatan Kedungbanteng.
4. Wilayah IV membawahi wilayah : Kecamatan Slawi, Kecamatan Lebaksiu, Kecamatan Dukuhwaru.
5. Wilayah V membawahi wilayah : Kecamatan Pagerbarang, Kecamatan Balapulang, Kecamatan Margasari.
6. Wilayah VI membawahi wilayah : Kecamatan Bojong, Kecamatan Bumijawa.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala UPTD Pemeliharaan Jalan dan Irigasi Wilayah Kelas A mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja UPTD Pemeliharaan Jalan dan Irigasi Wilayah;
- b. Penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis operasional pemeliharaan jalan dan irigasi di wilayah kerja UPTD Pemeliharaan Jalan dan Irigasi Wilayah;
- c. Pelaksanaan pembinaan teknis pemeliharaan jalan dan irigasi di wilayah kerjanya;
- d. Pelaksanaan, pengawasan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan serta pengendalian teknis pemeliharaan jalan dan irigasi di wilayah kerjanya;

- e. Pelaksanaan pemeliharaan jalan dan irigasi di wilayah kerjanya;
- f. Pembinaan pengelolaan ketatausahaan UPTD Pemeliharaan Jalan dan Irigasi Wilayah;
- g. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas UPTD Pemeliharaan Jalan dan Irigasi Wilayah.

19. Nama Jabatan : Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD

Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD mempunyai tugas pokok membantu Kepala UPTD dalam melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja, dan ketatausahaan UPTD.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana kerja UPTD ;
- b. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan ketatausahaan UPTD;
- c. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan di UPTD;
- d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian tata usaha UPTD.

20. Nama Jabatan : Kelompok Jabatan Fungsional

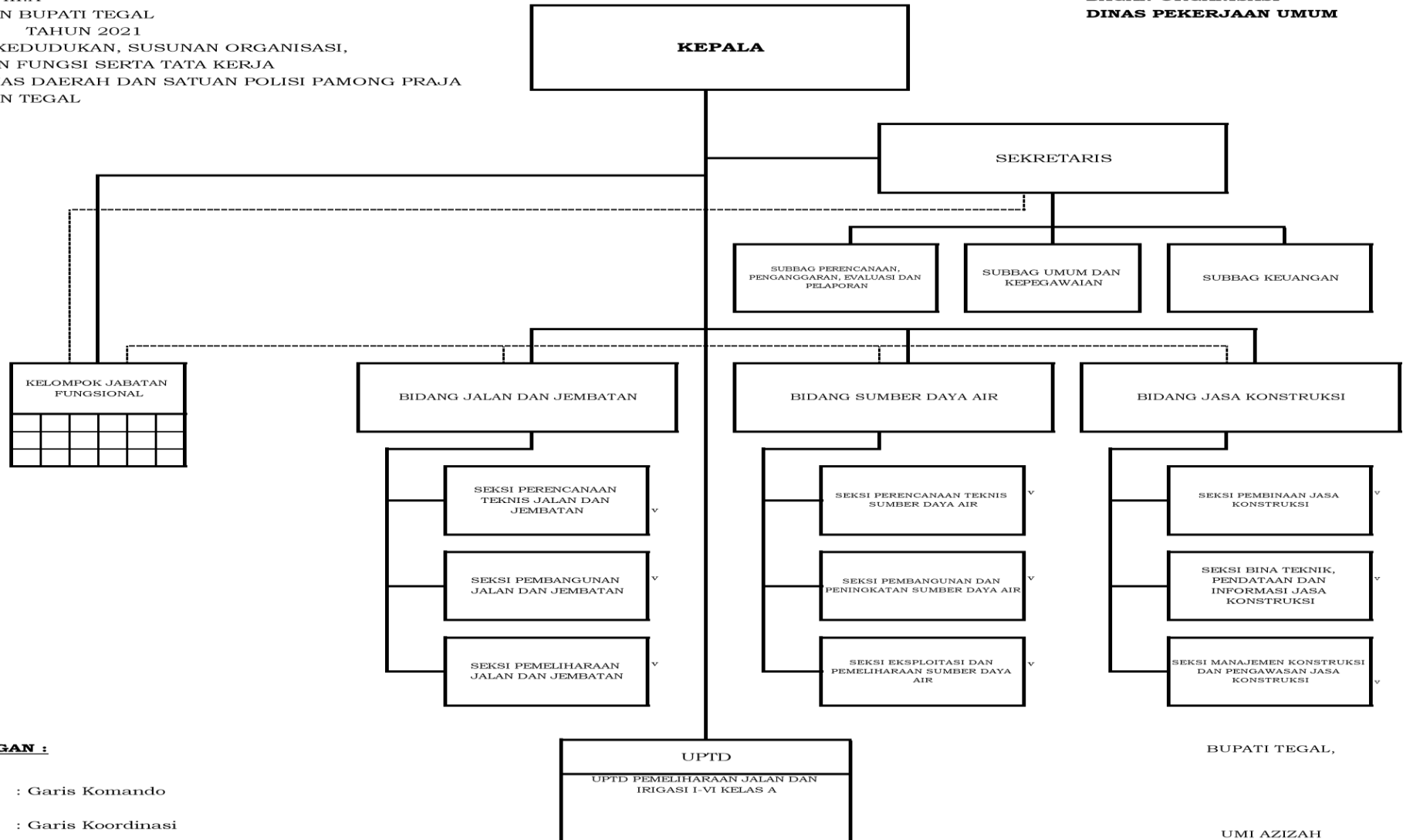
Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan wewenang, tugas pokok dan fungsi Dinas sesuai uraian tugas berdasarkan Pedoman Angka Kredit Jabatan. Dalam menjalankan tugasnya kelompok jabatan fungsional mendasarkan pada prinsip kompetensi, keahlian/keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

Table 2.1

Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal

LAMPIRAN III.A
 PERATURAN BUPATI TEGAL
 NOMOR TAHUN 2021
 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
 TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
 DINAS-DINAS DAERAH DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
 KABUPATEN TEGAL

**BAGAN ORGANISASI
 DINAS PEKERJAAN UMUM**



KETERANGAN :

————— : Garis Komando

- - - - - : Garis Koordinasi

BUPATI TEGAL,

UMI AZIZAH

2.2 SUMBER DAYA DINAS PEKERJAAN UMUM

2.2.1 Sumber Daya Manusia (SDM)

Pegawai dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum sampai dengan tahun 2020 berjumlah 467 orang terdiri dari 165 Pegawai Negeri Sipil (155 laki-laki dan 10 perempuan), 10 Calon Pegawai Negeri Sipil (5 Laki-laki dan 5 Perempuan), 5 Pegawai Tidak Tetap (4 laki-laki dan 1 perempuan) dan 287 Pegawai Harian Lepas (PHL). Jumlah pejabat struktural sebanyak 30 orang terdiri dari laki-laki 27 orang dan perempuan 3 orang. Jumlah pejabat struktural tersebut meliputi 1 orang pejabat eselon II.b, 1 orang pejabat eselon III.a, 4 orang pejabat eselon III. b, 15 orang pejabat eselon IV.a, dan 9 orang pejabat eselon IV.b.

Adapun komposisi pegawai berdasarkan Golongan, Pendidikan, Tingkat Umur dan Agama per Bulan Desember 2020 adalah sebagai berikut :

a. Jumlah Pegawai DPU Kab. Tegal menurut Golongan

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai DPU menurut Golongan per bulan Desember 2020

No	Unit Kerja	Golongan								Jumlah		
		IV		III		II		I		L	P	Total
		L	P	L	P	L	P	L	P			
1	Kepala Dinas	1	-	-	-	-	-	-	-	1	0	1
2	Sekretariat	1	-	5	3	11	3	-	-	17	6	23
3	Bidang Jalan	-	-	12	2	3	-	-	-	15	2	17
4	Bidang Jembatan	-	-	8	-	2	-	-	-	10	0	10
5	Bidang Sumber Daya Air	2	-	5	1	5	-	-	-	12	1	13
6	Bidang Jasa Konstruksi, Laboratorium dan Monev	-	-	8	2	8	2	-	-	16	4	20
7	UPTD Wilayah I Pemeliharaan Jalan dan Pengairan	-	-	4	-	15	-	-	-	19	0	19

No	Unit Kerja	Golongan								Jumlah		
		IV		III		II		I		L	P	Total
		L	P	L	P	L	P	L	P			
8	UPTD Wilayah II Pemeliharaan Jalan dan Pengairan	-	-	2	1	9	-	-	-	11	1	12
9	UPTD Wilayah III Pemeliharaan Jalan dan Pengairan	1	-	1	1	7	-	-	-	9	1	10
10	UPTD Wilayah IV Pemeliharaan Jalan dan Pengairan	-	-	4	-	7	-	-	-	11	0	11
11	UPTD Wilayah V Pemeliharaan Jalan dan Pengairan	-	-	5	-	19	-	1	-	25	0	25
12	UPTD Wilayah VI Pemeliharaan Jalan dan Pengairan	-	-	2	-	10	-	2	-	14	0	14
Jumlah		5	-	56	10	96	5	3	0	160	15	175

b. Jumlah Pegawai DPU Kab. Tegal menurut tingkat Pendidikan

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai DPU menurut tingkat Pendidikan per bulan Desember 2020

No	Unit Kerja	Tingkat Pendidikan												Jumlah			
		S2		S1		DIII		SLTA		SLTP		SD		L	P	Total	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P				
1	Kepala Dinas	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0	1
2	Sekretariat	2	-	5	3	-	-	11	2	-	-	-	-	18	5	23	
3	Bidang Jalan	-	-	10	2	1	-	4	-	-	-	-	-	15	2	17	
4	Bidang Jembatan	2	-	5	-	1	-	2	-	-	-	-	-	10	0	10	
5	Bidang Sumber Daya Air	2	-	4	1	-	-	5	-	1	-	-	-	12	1	13	
6	Bidang Jasa Konstruksi, Laboratorium dan Monev	1	-	5	2	-	-	8	2	2	-	-	-	16	4	20	
7	UPTD Wilayah I Pemeliharaan Jalan dan Pengairan	-	-	-	-	-	-	17	-	2	-	-	-	19	0	19	
8	UPTD Wilayah II Pemeliharaan Jalan dan Pengairan	-	-	-	1	1	-	9	-	1	-	-	-	11	1	12	
9	UPTD Wilayah III Pemeliharaan Jalan dan Pengairan	1	-	-	-	-	1	7	-	-	-	1	-	9	1	10	
10	UPTD Wilayah IV Pemeliharaan Jalan dan	-	-	1	-	-	-	8	-	2	-	-	-	11	0	11	



Pengairan																			
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

No	Unit Kerja	Tingkat Pendidikan												Jumlah		
		S2		S1		DIII		SLTA		SLTP		SD		L	P	Total
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P			
11	UPTD Wilayah V Pemeliharaan Jalan dan Pengairan	1	-	1	-	-	-	17	-	3	-	3	-	25	0	25
12	UPTD Wilayah VI Pemeliharaan Jalan dan Pengairan	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	2	-	14	0	14
Jumlah		10	-	33	9	3	1	100	4	11	-	6	-	161	14	175

c. Jumlah Pegawai DPU Kab. Tegal menurut Agama

Tabel 2.4
Jumlah Pegawai DPU menurut Agama per bulan Desember 2020

No	Unit Kerja	Islam	Katholik	Kristen	Hindu	Budha
1	Kepala Dinas	1	-	-	-	-
2	Sekretariat	23	-	-	-	-
3	Bidang Jalan	17	-	-	-	-
4	Bidang Jembatan	10	-	-	-	-
5	Bidang Sumber Daya Air	13	-	-	-	-
6	Bidang Jasa Konstruksi, Laboratorium dan Monev	20	-	-	-	-
7	UPTD Wilayah I Pemeliharaan Jalan dan Pengairan	19	-	-	-	-
8	UPTD Wilayah II Pemeliharaan Jalan dan Pengairan	12	-	-	-	-
9	UPTD Wilayah III Pemeliharaan Jalan dan Pengairan	10	-	-	-	-
10	UPTD Wilayah IV Pemeliharaan Jalan dan Pengairan	11	-	-	-	-
11	UPTD Wilayah V Pemeliharaan Jalan dan Pengairan	25	-	-	-	-
12	UPTD Wilayah VI Pemeliharaan Jalan dan Pengairan	14	-	-	-	-
Jumlah		175	-	-	-	-

d. Jumlah Pegawai DPU Kab. Tegal menurut Usia

Tabel 2.5
Jumlah Pegawai DPU menurut Usia per bulan Desember 2020

No	Unit Kerja	Usia																Jumlah			
		< 25		26-30		31-35		36-40		41-45		46-50		51-55		56-60		L	P	Total	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P						
1	Kepala Dinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	0	1
2	Sekretariat	-	-	-	1	-	-	2	1	2	-	5	-	8	4	-	-	17	5	22	
3	Bidang Jalan	-	-	4	2	-	-	-	-	1	-	4	-	5	-	1	-	15	2	17	
4	Bidang Jembatan	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	2	-	4	-	1	-	10	0	10	
5	Bidang Sumber Daya Air	-	-	1	1	-	-	1	-	2	-	2	-	4	-	2	-	12	1	13	
6	Bidang Jasa Konstruksi, Laboratorium dan Monev	-	1	-	-	-	-	1	1	4	-	5	1	5	1	1	-	16	3	20	
7	UPTD Wilayah I Pemeliharaan Jalan dan Pengairan	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	6	-	8	-	3	-	19	0	19	
8	UPTD Wilayah II Pemeliharaan Jalan dan Pengairan	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	3	-	4	1	1	-	11	1	12	
9	UPTD Wilayah III Pemeliharaan Jalan dan Pengairan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	2	1	2	-	9	1	10	
10	UPTD Wilayah IV Pemeliharaan Jalan dan Pengairan	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	-	4	-	3	-	11	0	11	
11	UPTD Wilayah V Pemeliharaan Jalan dan Pengairan	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	8	-	12	-	2	-	25	0	25	
12	UPTD Wilayah VI Pemeliharaan Jalan dan Pengairan	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	7	-	3	-	3	-	14	0	14	
Jumlah		0	1	5	4	0	0	7	2	19	0	50	1	59	7	20	0	155	10	175	

2.2.2 Sarana dan Prasarana

a) Sarana dan Prasarana Jalan

NO.	KECAMATAN	PANJANG
1	Kramat	55,18
2	Suradadi	54,66
3	Warureja	44,00
4	Tarub	42,56
5	Talang	39,93
6	Dukuhturi	39,57
7	Adiwerna	45,94
8	Dukuhwaru	40,54
9	Slawi	77,14
10	Pangkah	52,76
11	Kedungbanteng	16,73
12	Jatinegara	51,47
13	Lebaksiu	29,16
14	Pagerbarang	48,24
15	Balapulang	56,20
16	Bumijawa	70,39
17	Bojong	45,88
18	Margasari	36,92
JUMLAH		847,27

b) Sarana dan Prasarana Jembatan

NO	KECAMATAN	JUMLAH (Unit)
I.	UPTD PU WIL I	
1	Kecamatan Kramat	30
2	Kecamatan Suradadi	15
3	Kecamatan Warureja	20
II.	UPTD PU WIL II	
1	Kecamatan Adiwerna	26
2	Kecamatan Dukuhturi	31
3	Kecamatan Talang	25
4	Kecamatan Tarub	13
III.	UPTD PU WIL III	
1	Kecamatan Pangkah	27
2	Kecamatan Jatinegara	28
3	Kecamatan Kedungbanteng	13
IV.	UPTD PU WIL IV	
1	Kecamatan Slawi	38
2	Kecamatan Dukuhwaru	11
3	Kecamatan Lebaksiu	16

NO	KECAMATAN	JUMLAH (Unit)
V.	UPTD PU WIL V	
1	Kecamatan Balapulang	50
2	Kecamatan Margasari	22
3	Kecamatan Pagerbarang	28
VI.	UPTD PU WIL VI	
1	Kecamatan Bumijawa	18
2	Kecamatan Bojong	34
	Jumlah Total	445

c) Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air

NAMA DAERAH IRIGASI	KECAMATAN	LUAS D.I. (Ha)	PANJANG (Km)
WILAYAH II			
	JUMLAH KEC. PANGKAH	15	0,50
WILAYAH III			
	JUMLAH KEC. JATINEGARA	1.718	67,37
WILAYAH IV			
	JUMAH KEC. BALAPULANG	1.108	23,53
WILAYAH V			
	JUMLAH KEC. MARGASARI	1.089	26,81
WILAYAH VI			
	JUMLAH KEC. BUMIJAWA	3.010	79,16
	JUMLAH KEC. BOJONG	2.356	79,15
	TOTAL	9.281	276,02

d) Sarana dan Prasarana Peralatan

NO	NAMA ALAT	Total
1	AC Split	11
2	AC Unit	3
3	Air Compressor	1
4	Alat Keamanan Lain-lain	2
5	Alat Lab Mekanik tanah Lain-Lain	1
6	Alat Pemadam Portable	1
7	Alat Pengukur Curah Hujan	1
8	Alat Ukur Lainnya	6
9	Aspal Equipment Lain-lain	4
10	Band Kas	2
11	Calibration Anvill for Concrete	1
12	CCTV	1
13	Centrifuge Hemsine Eq. App	1
14	Compacting Equipment Lain-lain	25
15	Digital	9

NO	NAMA ALAT	Total
16	Dispenser	3
17	Dump Truck	5
18	DVD Player (Conference System)	3
19	Electric Concrete Core drill	1
20	Facsimile	1
21	Filling Besi/Metal	15
22	Filling Kayu	1
23	Forklift	1
24	Gergaji Mesin/Chainsaw	1
25	Gerobak Dorong	2
26	Gerobak Tarik	4
27	Global Positioning System (GPS)	8
28	Grader Lain-lain	1
29	Grader+Attachment	1
30	Handy Cam	2
31	Handy Talky	1
32	Hard Disk	2
33	Hecmaching Besar/Staples	1
34	Ipad/Komputer Tablet	1
35	Jeep	1
36	Kabel Listril	1
37	Karpet	1
38	Kendaraan Bermotor Roda Tiga Lain-lain	2
39	Kipas Angin	7
40	Kitchen Set	1
41	Kontainer Sampah	2
42	Kursi Besi/Metal	1
43	Kursi Kayu/Rotan/Bambu	12
44	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	5
45	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1
46	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	4
47	Kursi Lipat	3
48	Kursi Rapat Pejabat Lain-lain	1
49	Kursi Tamu di Ruang Pejabat Lain-lain	1
50	Lain-lain Alat Angkut	1
51	Lampu Senter	1
52	Lap Top	20
53	Layar Proyektor/Screen	4
54	Lemari Besi	10
55	Lemari Buku untuk Perpustakaan	1
56	Lemari Es	2
57	Lemari Kaca	4
58	Lemari Kayu	4
59	Lemari Sorok	1
60	Loader Lain-lain	2
61	Loudspeaker	2
62	Mainframe	1
63	Meja Gambar	3
64	Meja Kayu/Rotan	14
65	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	6
66	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1

NO	NAMA ALAT	Total
67	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	2
68	Meja Komputer	2
69	Meja Rapat	3
70	Meja Tamu Ruangan Biasa	4
71	Mesin Bor	1
72	Mesin Hitung Elektronik	1
73	Mesin Ketik Manual Portable (11-13)	7
74	Mesin Penghisap Debu	2
75	Mesin Potong Rumput	6
76	Microphone	1
77	Microphone/Wireless Mic	1
78	Model Jam Bentuk dasar	1
79	Modem	1
80	Monitor	1
81	Note Book	3
82	Out Side Broadcast Van Televisi	1
83	Papan Panel	1
84	Peralatan Jaringan lain-lain	2
85	Peralatan Personal Komputer Lain-lain	1
86	Perkakas Bengkel Service Lain-lain	1
87	Personal Computer Unit (P.C)	16
88	Pesawat Telephone	1
89	Pick Up	7
90	Ploter	1
91	Pompa Air	1
92	Portable Generating Set	1
93	Power Amplifier	1
94	Printer	39
95	Prople Proyektor Toyo Serie	1
96	Proyektor + Attachment	7
97	Rak Besi/Metal	3
98	Rak Kayu	3
99	Sepeda Motor	47
100	Server	1
101	Sound System	2
102	Speaker Aktif	3
103	Speaker System (Conference System)	1
104	Stamper	3
105	Station Wagon	14
106	Takel	1
107	Tangga Alumunium	3
108	Teko Listrik	1
109	Telephone (PABX)	1
110	Televisi	9
111	Teralis	1
112	Theodolit	1
113	Timbangan	1
114	Tustel	8
115	Vertical Cylinder Caping Set (Core Dril Beton)	1
116	Waterpas	1
117	Waterpass Digital	2

NO	NAMA ALAT	Total
118	Wireless	1
119	Wireless Amplifier	1
120	Zice	4
121	Grand Total	473

2.3 CAPAIAN KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM

2.3.1 Infrastruktur Jalan

Secara kewilayahan Kabupaten mempunyai pusat-pusat kegiatan yang tersebar secara sporadis yang terkoneksi dengan sistem jaringan prasarana jalan dimana berdasar SK Bupati Tegal Nomor 050/583/2014 tentang Penetapan Jalan Kabupaten Tegal, panjang jalan Kabupaten adalah 847,27 kilometer. Sedangkan untuk Jalan Nasional yang berada di Wilayah Kabupaten Tegal sepanjang 68,29 kilometer, Jalan Provinsi sepanjang 54,63 kilometer, serta jalan desa di Kabupaten Tegal sepanjang 691,28 kilometer.

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pembangunan Jalan Kabupaten
Selama kurun waktu 2015-2019

No	Kondisi Jalan	Panjang Jalan Per Tahun									
		2015		2016		2017		2018		2019	
		Km	%	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%
1.	Baik	302,68	35,72	374,11	44,15	377,94	44,6	528,9	62,42	576,24	68,01
2.	Rusak Ringan	120,56	14,23	117,37	13,85	170,34	20,1	118,7	14,00	105,73	12,48
3.	Rusak Sedang	177,37	20,93	150,93	17,81	139,51	16,5	82,98	9,79	70,94	8,37
4.	Rusak Berat	246,66	29,11	204,86	24,18	159,48	18,8	116,8	13,78	94,355	11,14
	Total	847,27	100	847,27	100	847,27	100	847,3	100	847,27	100

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum, 2020

Berdasarkan tabel di atas secara umum, dalam kurun waktu 5 tahun terakhir kondisi jalan Kabupaten yang baik meningkat Persentasenya. Hal ini merupakan hasil pembangunan yang didanai APBD Kabupaten Tegal. Saat ini kondisi jalan rusak berat masih

mencapai 116,8 km atau sekitar 13,78%. Kondisi jalan rusak berat ini menjadi prioritas dan Pekerjaan Rumah yang harus diselesaikan secara tuntas di waktu yang akan datang.

Untuk menjamin konektivitas antar wilayah di Kabupaten Tegal, Indikator infrastruktur jalan seharusnya bukan lagi baik, rusak ringan, maupun rusak berat. Namun seharusnya indikator pembangunan infrastruktur jalan mantap dan tidak mantap. Jalan Mantap dapat diartikan dengan jalan yang ada secara fisik harus dalam kondisi baik, secara dimensi dan kelengkapan jalannya harus sesuai dengan fungsinya.

2.3.2 Infrastruktur Jembatan

Data infrastruktur jembatan di Kabupaten Tegal pada Tahun 2015 berjumlah 436 unit, sedangkan pada akhir Tahun 2018 berjumlah 444 unit. Hal ini selama kurung waktu 5 tahun terakhir terdapat pembangunan jembatan baru dan updating data jembatan.

Tabel 2.7
Pencapaian Kinerja Pembangunan Jembatan Kabupaten
selama kurun waktu 2015-2019

No	Kondisi Jalan	Jumlah Jembatan Per Tahun									
		2015		2016		2017		2018		2019	
		%	Unit	%	Unit	%	Unit	Unit	%	Unit	%
1.	Baik	57,34	266	61,01	282	64,7	298	298	67,12	301	67,79
2.	Rusak Ringan	5,96	50	11,47	69	15,8	93	93	20,95	91	20,5
3.	Rusak Sedang	11,47	52	11,93	57	13,1	30	30	6,76	30	6,76
4.	Rusak Berat	25,23	68	15,6	28	6,42	23	23	5,18	22	4,95
	Total	100	436	100	436	100	444	444	100	444	100

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum, 2020

Berdasarkan data tersebut di atas, kondisi jembatan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir semakin baik dimana jembatan yang baik sebanyak 301 unit (67,79%), sedangkan yang masih dalam kondisi rusak berat dan sedang adalah 52 unit (11,94%). Sebagaimana infrastruktur jalan, infrastruktur jembatan haruslah mengikuti

infrastruktur jalan, dimana ke depan kondisi jembatan harus dalam kondisi mantap yaitu mantap dalam arti sesuai dengan fungsi jalan yaitu dimensi (panjang dan lebar) harus sesuai dengan fungsinya.

2.3.3 Infrastruktur Drainase

Tabel 2.8
Pencapaian Kinerja Pembangunan Drainase Jalan Kabupaten
selama kurun waktu 2016-2020

No	Kelengkapan Jalan	Panjang Drainase Jalan Per Tahun									
		2016		2017		2018		2019		2020	
		Km	%	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%
a.	Jalan Kabupaten	847,27	100	847,27	100	847,27	100	847,27	100	847,27	100
b.	Jalan yg harus berdrainase	477,46	56,35	477,46	56,35	477,46	56,35	490,15	57,85	490,15	57,85
c.	Jalan yg tidak harus berdrainase	147,83	17,45	137,02	16,17	115,40	13,62	79,17	9,34	70,77	8,35
d.	Jalan yang berdrainase	221,98	26,20	232,79	27,48	254,41	30,03	277,95	32,81	286,35	33,80
e.	Persentase Jalan berdrainase (d/b)	46,49		48,76		53,28		56,71		58,42	

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum, 2020

2.3.4 Infrastuktur Sumber Daya Air

Gambaran kinerja pada aspek pembangunan infrastruktur sumber daya air di Kabupaten Tegal selama kurun waktu tahun 2014-2018 dapat dilihat dari beberapa indikator sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 2.9
Pencapaian Kinerja Pembangunan Irigasi Kabupaten selama kurun waktu 2014-2019

No	Kondisi Jaringan Irigasi	Panjang Irigasi Per Tahun									
		2015		2016		2017		2018		2019	
		Km	%	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%
1.	Baik	137	46,96	146	50,05	155	53,1	164,5	56,39	160,58	58,17
2.	Rusak Ringan	46	15,77	49	16,8	52	17,8	67,2	22,97	44,82	16,24

No	Kondisi Jaringan Irigasi	Panjang Irigasi Per Tahun									
		2015		2016		2017		2018		2019	
		Km	%	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%
3.	Rusak Sedang	25,88	8,87	23,74	8,138	21,69	7,44	44,85	15,37	59,00	21,37
4.	Rusak Berat	82,84	28,40	72,98	25,02	63,03	21,6	15,43	5,26	11,62	4,21
	Total	291,72	100	291,72	100	291,72	100	291,7	100	276,02	100

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum, 2020

Berdasarkan kewenangannya, Daerah Irigasi (DI) yang menjadi kewenangan Kabupaten Tegal sebanyak 208 DI dengan luas 9.281 hektare. Kebutuhan air daerah irigasi Kabupaten tersebut dipenuhi melalui jaringan irigasi. Panjang saluran irigasi saat ini mencapai 276,02 km, dengan kondisi jaringan irigasi yang mantap 207,30 km (75,01%) sedangkan yang mengalami kerusakan ringan dan rusak berat (tidak mantap) sepanjang 70,02 km (24,99%).

2.3.5 Pengelolaan Sampah Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3)

Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Kabupaten Tegal dilaksanakan melalui penambahan armada dan sarana prasarana persampahan. Volume sampah yang terangkut per hari di Kabupaten Tegal diharapkan akan terjadi peningkatan yang signifikan. Hasil dari pengelolaan sampah adalah meningkatnya volume sampah yang terangkut per hari sebagaimana tersaji data pada Tabel dibawah ini.

Tabel 2.10
Volume Sampah Yang Terangkut Per Hari Tahun 2015-2020

No.	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah volume sampah yang terangkut (m ³)	251,42	289,89	347,00	512,37	566	578
2	Jumlah volume sampah yang dihasilkan (m ³)	960,09	458,00	496,00	640,46	573,41	583,79
3	Sampah terangkut	26,19	63,29	70,00	80,00	98,00	99,00

Sumber: DLH Kab. Tegal, Tahun 2020

Dalam penanganan sampah menggunakan pendekatan berbasis *3R* yaitu *Reduce* (mengurangi), *Reuse* (menggunakan kembali) dan *Recycle* (mendaur ulang) telah dibentuk Bank Sampah melalui komunitas sebanyak 120 unit di tahun 2018 ini. Dengan jumlah tersebut di harapkan dapat meningkat di tahun 2024, sehingga program pengurangan sampah plastik di harapkan dapat secara maksimal di terapkan. Berikut adalah data pembentukan Bank Sampah sebagaimana Tabel di bawah ini.

Tabel 2.11
Bank Sampah Tahun 2015 – 2020

No.	Keterangan	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Bank Sampah (unit)	81	86	86	120	130	140
2.	Potensi Bank Sampah yg dibentuk (unit)	90	100	100	129	135	140
3.	Bank Sampah yg dibentuk (%)	90	86	86	93	96	100

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal Tahun 2020

Berikut adalah gambaran rasio tempat pembuangan sampah terhadap jumlah penduduk di Kabupaten Tegal, sebagaimana Tabel di bawah ini.

Tabel 2.12
Rasio Tempat Pembuangan Sampah Sementara terhadap Jumlah Penduduk Tahun 2015-2020

No.	Uraian	Kondisi TPS					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah TPSS (unit)	45	72	113	118	124	129
2.	Jumlah Daya Tampung TPS (ton)	88,71	141,92	222,75	240,66	206,43	242,50
3.	Jumlah Penduduk (jiwa)	1.424.890	1.429.386	1.433.515	1.437.225	1.566.587	1.599.432
4.	Rasio Daya Tampung TPS per 1.000 penduduk	0.062	0.099	0,155	0,082	0,155	0,151

Sumber: DLH Kab. Tegal, Tahun 2020

Sebelum sampah diangkut/dibuang ke TPSA, terlebih dahulu sampah dikumpulkan di beberapa lokasi TPSS yang sudah ditentukan. Jumlah TPSS di Kabupaten Tegal pada tahun 2017

sebanyak 113 buah (berlokasi di pasar dan pabrik). Daya tampung setiap TPSS tersebut sebesar 222,75 ton. Kabupaten Tegal saat ini hanya memiliki 1 (satu) TPA yaitu TPA Penujah dengan menggunakan sistem *controlled landfill* sehingga perlu ditingkatkan ke sistem *sanitary landfill*, mendasari hal tersebut maka, perlu dilaksanakan revitalisasi TPA Penujah dan Perencanaan Pembuatan TPA baru untuk meningkatkan pemrosesan akhir sampah di Kabupaten Tegal.

Tabel 2.13
Kondisi Tempat Pemrosesan Sampah Tahun 2015-2020

No	Uraian	Kondisi TPA					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Volume Sampah (m ³)	91.766	104.359	124.708	137.883	146,604	148,425
2.	Jumlah TPA (unit)	1	1	1	1	1	1
3.	Luas TPA (m ²)	41.691	41.691	41.691	41.691	41.691	41,691

Sumber: DLH Tahun 2020

Tabel 2.14
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (Renstra Periode 2015-2019)

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target yang diamanatkan peraturan perUndang-undangan	Target lainnya (Renstra K/L, PD Provinsi, dll)	Target Renstra 2015-2019					Realisasi Capaian Renstra					Rasio Capaian % (Target dibagi Realisasi)				
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
	Indikator Sasaran																		
	Persentase Jalan dalam Kondisi Baik	Persen			35,72	45,56	60,00	65,00	68,00	35,72	45,56			68,01	100	100	0,00	0,00	99,99
	Persentase Jembatan dalam Kondisi Baik	Persen			45,00	50,00	53,60	55,00	60,00	45,00	50,00			67,79	100	100	0,00	0,00	88,51
	Persentase Panjang Jalan Kabupaten Baik Sesuai Standar Bina Marga	Persen			35,72	45,55	60,00	65,00	68,00	35,72	45,55			77,57	100	100	0,00	0,00	87,66
	Persentase Drainase Jalan Kabupatenden Berfungsi Baik	Persen			25,50	32,35	60,00	70,00	75,00	25,50	32,35				100	100	0,00	0,00	0,00
	Persentase Panjang Talud Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik	Persen			20,32	9,56	15,00	20,00	30,00	20,32	9,56				100	100	0,00	0,00	0,00
	Persentase Sarana dan Prasarana Bina Marga dalam Kondisi Baik	Persen			75,00	80,00	85,00	90,00	95,00	75,00	80,00				100	100	0,00	0,00	0,00
	Persentase Panjang Jembatan Kabupaten Baik Sesuai Standar Bina Marga	Persen			45,00	50,00	53,60	55,00	60,00	45,00	50,00				100	100	0,00	0,00	0,00
	Persentase Saluran Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik	Persen			40,00	45,00	55,00	60,00	65,00	40,00	45,00				100	100	0,00	0,00	0,00
	Cakupan Daerah Irigasi terhadap Luas Lahan Pertanian	Persen			50,00	53,00	55,00	60,00	65,00	50,00	53,00				100	100	0,00	0,00	0,00
	Persentase Sungai, Danau dan Sumber Daya Air dalam Kondisi Baik	Persen			56,45	60,00	65,00	70,00	75,00	56,45	60,00				100	100	0,00	0,00	0,00

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target Yang diamanatkan peraturan perUndang-undangan	Target lainnya (Renstra K/L, PD Provinsi, dll)	Target Renstra 2015-2019					Realisasi Capaian Renstra					Rasio Capaian % (Target dibagi Realisasi)				
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
	Indikator Program																		
1	Persentase Panjang Jalan Kabupaten Baik Sesuai Standar Bina Marga	Persen			63,00	64,00	65,00	67,00	68,00						0	0	0	0	0,00
2	Persentase Panjang Jalan Desa baik sesuai standar Bina Marga				66,00	67,00	68,00	69,00	70,00					100,00	0	0	0	0	70,00
3	Jumlah panjang jalan dengan lebar 6 m	km			139,7	141,7	143,7	145,7	147,7					48,55	0	0	0	0	32,87
4	Jumlah panjang jalan dengan lebar 9 m	km			71,5	71,5	71,5	71,5	71,5					21,79	0	0	0	0	30,48
5	Jumlah panjang jalan kolektor	km			194	194	194	194	194					100	0	0	0	0	51,55
6	Persentase drainase jalan kabupaten berfungsi baik	Persen			41,00	42,00	43,00	44,00	45,00					128,56	0	0	0	0	285,69
7	Persentase drainase jalan desa berfungsi baik	Persen			46,00	47,00	48,00	49,00	50,00	50,00				100,00	108,70	0	0,00	0	200,00
8	Panjang talud jalan kabupaten terbangun	m			6.500	10.000	13.500	17.000	20.500					202	0	0	0	0	0,99
9	Panjang talud jalan desa terbangun	m			9.000	11.000	13.000	15.000	17.000					100	0	0	0	0,00	0,59
10	Panjang talud pengairan yang terbangun	m			200	250	350	500	650					130	0	0	0	0	20,00
11	Panjang talud pengairan yang direhabilitasi	m			120	200	315	455	630					132,86	0	0	0,00	0	21,09
12	Panjang jalan direhabilitasi	km			160	170	190	200	220					100	0	0	0,00	0	45,45
13	Jumlah jembatan direhabilitasi	bh			70	105	140	175	210					64,76	0	0	0,00	0	30,84


No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target Yang diamanatkan peraturan perUndang-undangan	Target lainnya (Renstra K/L, PD Provinsi, dll)	Target Renstra 2015-2019					Realisasi Capaian Renstra					Rasio Capaian % (Target dibagi Realisasi)				
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
14	Persentase panjang talud direhabilitasi	Persen			11,00	12,00	13,00	14,00	15,00	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	100,00
15	Sistem Informasi Jalan dan Jembatan yang aktif				-	-	1	1	1	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	100,00
16	Jumlah inspeksi jalan dan jembatan	Ruas			100	150	200	250	300	-	-	-	-	151,00	-	-	-	-	50,33
17	Panjang irigasi dalam kondisi baik	m			2.500	3.750	5.000	6.250	7.500	-	-	-	-	55,15	-	-	-	-	0,74
18	Persentase sungai, danau dan sumber daya air dalam kondisi baik	Persen			20,00	25,00	30,00	35,00	40,00	-	-	-	-	60,43	-	-	-	-	151,08
19	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air bersih perpipaan	Persen			30,48	32,48	34,48	36,48	38,48	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	100,00
20	Persentase kawasan rawan banjir	Persen			4,90	4,80	4,70	4,60	4,50	-	-	-	-	94,67	-	-	-	-	100,00
21	Jumlah pengembangan kota satelit				1	1	1	1	1	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	100,00
22	Cakupan infrastruktur perdesaan kondisi baik	Persen			57,00	60,00	63,00	65,00	68,00	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	100,00
23	Jumlah rumah tangga yg mendapatkan akses air bersih (unit)	Persen			277.292	n/a	277.292	292.292	-	310.547	315.547	377.063	377.063	-	1.11	-	1.35	1.29	-
24	Persentase rumah tangga berskses air bersih perpipaan	Persen			69.52	n/a	69.52	63.52	-	69.50	67.45	65.50	65.50	-	0.99	-	0.95	1.03	-
25	Persentase bangunan ber IMB	Persen			3.5	n/a	4.3	4.8	-	5.8	6.1	6.5	6.7	-	1.65	-	1.51	1.39	-
26	Persentase RTH dibanding luas wilayah	Persen			4.50	n/a	4.56	5.40	-	19.56	19.56	19.54	19.54	-	4.34	-	4.28	3.61	-

di kawasan perkotaan																			
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tabel 2.15

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (Renstra Terbatas 2020-2024)

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target Yang diamankan peraturan perUndang-undangan	Target lainnya (Renstra K/L, PD Provinsi, dll)	Target Renstra					Realisasi Capaian Renstra					Rasio Capaian % (Target dibagi Realisasi)				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Indikator Tujuan																		
2	Indikator Sasaran																		
	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Persentase jalan yang memiliki drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5)					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Persentase jembatan kabupaten dalam kondisi baik					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Indikator Program																		
	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	Persentase				70,02	77,62	85,22	92,82	100	68,77	-	-	-	-	1,02	-	-	-
	Persentase jalan yang memiliki drainase/ saluran pembuangan air (minimal 1,5)	Persentase				14,30	14,30	14,30	14,30	100	14,30	-	-	-	-	1,00	-	-	-
	Proporsi Jembatan dalam Kondisi Baik	Persentase				73,51	79,91	86,31	82,71	100	68,69	-	-	-	-	1,07	-	-	-
	Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi baik	Persentase				66,40	74,80	83,20	91,60	100	58,86	-	-	-	-	1,13	-	-	-



Secara lebih detail, data anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal pada periode 2015-2019 dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 2.16

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal Tahun 2015 – 2019

No	Program	Anggaran pada Tahun (Rp X 1000)					Realisasi Anggaran pada Tahun (Rp X 1000)					Rasio antara Anggaran dan Realisasi pada Tahun (%)					Rata-rata Pertumbuhan	
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi
1	Pelayanan Adm Perkantoran	910.000	1.045.000	994.280	990.000	1.100.000	695.492	852.081	860.723	860.723	965.062	76,43	81,54	86,57	86,90	87,73	2%	5%
2	Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	9.753.886	6.847.481	910.000	2.080.000	2.877.250	6.638.367	6.459.722	875.395	1.868.328	2.652.933	68,06	94,34	96,20	89,82	92,20	-32%	-27%
3	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	180.000	50.000	70.000	100.000	110.000	151.176	46.209	67.758	99.772,38	100.551	83,99	92,42	96,80	99,77	91,41	-14%	-10%
4	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	653.828	200.000	230.000	400.000	480.000	193.032		218.732	363.059	459.736	29,52	90,31	95,10	90,76	95,78	-12%	17%
5	Pembangunan Jalan dan Jembatan	21.545.000	278.630.789	168.211.490	185.964.027	120.669.931	7.179.325	209.435.205	147.352.536	168.977.400	98.841.304	33,32	75,15	87,60	90,87	81,91	71%	120%
6	Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	40.000	--	10.000	10.000	10.000	37.673	-	9.999	8.050	9.999	94,18	0,00	93,56	80,50	99,99	-29%	-32%
7	Peningkatan dan pengembangan Pengelolaan keuangan Daerah	135.000	-	200.000	150.000	-	23.526	-	187.741	100.530	-	17,43	0,00	93,87	67,02	0,00	3%	44%
8	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	32.917.585	46.473.300	27.599.427	18.117.000	15.684.165	14.159.861	42.274.746	25.412.956	17.148.342	14.959.971	43,02	90,97	92,08	94,65	95,38	-14%	5%
9	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	-	5.574.496	2.915.000	1.800.000	2.280.000	-	5.331.366	2.733.129	1.487.214	1.973.203	0,00	95,64	93,76	82,62	86,54	-25%	-27%

No	Program	Anggaran Pada Tahun (Rp X 1000)					Realisasi Anggaran Pada Tahun (Rp X 1000)					Rasio antara Anggaran dan Realisasi pada Tahun (%)					Rata-rata Pertumbuhan	
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi
10	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	20.599.318	23.328.306	19.969.500	15.630.100	10.350.420	15.147.463	15.009.959	17.290.522	14.375.679	9.339.642	73,53	64,34	86,58	91,97	90,23	-7%	-1%
11	Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai Danau dan SDA Lainnya	4.148.600	500.000	1.950.000	2.170.000	600.000	1.288.375	284.743	1.931.213	2.080.040	591.762	31,06	56,95	99,04	95,85	98,63	-15%	13%
12	Pengendalian Banjir	150.000	50.000	150.000	150.000	150.000	149.347	49.474	143.128	147.975	149.443	99,56	98,95	95,42	98,65	99,63	0%	0%
13	Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong	10.855.000	22.078.932	25.238.380	-	15.796.000	7.241.323	21.547.609	24.480.472	-	15.475.736	66,71	97,59	97,00	0,00	97,57	-100%	-100%
14	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Talud/ Bronjong	476.000	75.000	-	-	200.000	471.577	74.250	-	-	197.399	99,07	99,00	0,00	0,00	98,70	-100%	-100%
15	Peningkatan Sarana Prasarana Ke-Puan	850.000	-	-	-	-	377.407	-	-	-	-	44,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-100%	-100%
16	Peningkatan Jalan dan Jembatan	83.427.588	-	-	-	-	34.619.233	-	-	-	-	41,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-100%	-100%
17	Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	4.208.800	-	-	-	-	99.032	-	-	-	-	2,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-100%	-100%
18	Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	47.577.724	17.954.804	-	-	-	29.902.613	17.362.341	-	-	-	62,85	96,70	0,00	0,00	0,00	-100%	-100%

No	Program	Anggaran Pada Tahun (Rp X 1000)					Realisasi Anggaran Pada Tahun (Rp X 1000)					Rasio antara Anggaran dan Realisasi pada Tahun (%)					Rata-rata Pertumbuhan	
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi
19	Pembangunan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	320.000	508.100	-	-	-	8.145	485.315	485.315	-	-	2,55	95,52	0,00	0,00	0,00	-100%	-100%
20	Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong	4.491.000	18.010.070	23.331.542	-	25.488.000	2.883.279	16.707.227	22.708.605	-	25.228.392	64,20	92,78	97,33	0,00	98,98	-100%	-100%
21	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	3.600.000	1.922.208	-	-	-	1.473.834	1.922.208	-	-	-	40,94	100,00	0,00	0,00	0,00	-100%	-100%
22	Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	715.000	-	-	-	-	651.459	-	-	-	-	91,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-100%	-100%
23	Pengelolaan Areal Pemakaman	1.875.000	-	-	-	-	1.856.256	-	-	-	-	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100%	-100%
24	Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenaga Listrikan	9.943.122	-	-	-	-	9.511.600	-	-	-	-	95,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-100%	-100%
25	Lingkungan Sehat Perumahan	800.000	-	-	-	-	411.517	-	-	-	-	51,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-100%	-100%
26	Pemberdayaan Komunitas Perumahan	145.000	-	-	-	-	53.841	-	-	-	-	37,13	0,00	0,00	0,00	0,00	-100%	-100%
27	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	11.927.500	-	-	-	-	2.824.951	-	-	-	-	23,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-100%	-100%
28	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	8.457.500	-	-	-	-	7.947.576	-	-	-	-	93,97	0,00	0,00	0,00	0,00	-100%	-100%

No	Program	Anggaran Pada Tahun (Rp X 1000)					Realisasi Anggaran Pada Tahun (Rp X 1000)					Rasio antara Anggaran dan Realisasi pada Tahun (%)					Rata-rata Pertumbuhan	
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi
29	Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	4.315.000	-	-	-	-	1.281.090	-	-	-	-	29,69	0,00	0,00	0,00	0,00	-100%	-100%
30	Pengembangan Destinasi Pariwisata	-	-	930.720	-	-	-	-	745.210	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100%	-100%
31	Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	12.000	-	20.000	-	-	11.188	-	19.263	0,00	0,00	0,00	0,00	96,32	-100%	-100%

Tabel 2.17
Anggaran dan Realisasi (Renstra Terbatas)

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Anggaran Pada Tahun (Rp X 1000)					Realisasi Anggaran Pada Tahun (Rp X 1000)					Rasio antara Target dan Realisasi pada Tahun (%)					
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Indikator Tujuan																
2	Indikator Sasaran																
	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Persentase jalan yang memiliki drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Persentase jembatan kabupaten dalam kondisi baik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No	Program	Anggaran Pada Tahun (Rp X 1000)					Realisasi Anggaran Pada Tahun (Rp X 1000)					Rasio antara Target dan Realisasi pada Tahun (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Indikator Program															
	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	72.056.688	-	-	-	-	69.276.825	-	-	-	-	96,14%	-	-	-	-
	Persentase jalan yang memiliki drainase/ saluran pembuangan air (minimal 1,5)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Proporsi Jembatan dalam Kondisi Baik	10.834.255	-	-	-	-	10.558.082	-	-	-	-	97,45%	-	-	-	-
	Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi baik	7.226.303	-	-	-	-	5.070.022	-	-	-	-	70,26%	-	-	-	-



Berdasarkan data Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal 2015-2019, realisasi capaian kinerja jumlah Pekerjaan Umum tahunan sampai tahun 2019 adalah:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan anggaran Rp 1.100.000.000,00 tercapai realisasi anggaran Rp 965.062.380,00 dengan persentase 87,73% di akhir tahun 2019.
2. Program pembangunan jalan dan jembatan dari target biaya yang dianggarkan sejumlah Rp 120.669.931.000,00 baru tercapai Rp 98.841.304.159,00 atau tercapai sebesar 81,91%, namun sudah mampu meningkatkan panjang jalan kabupaten baik sesuai standar bina marga sebesar 77,57% dan meningkatkan jumlah panjang jalan dengan lebar 6 (enam) meter tercapai sebesar 48,55% serta dapat meningkatkan panjang jalan lebar 9 m sebesar 21,79%.
3. Program peningkatan promosi dan kerja sama investasi pada tahun 2019 dengan anggaran Rp 10.000.000,00 tercapai realisasi anggaran Rp 9.999.500,00 atau tercapai 100%.
4. Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan pada tahun 2019 terserap anggaran Rp 14.959.971.609,00 dari anggaran sejumlah Rp 15.684.165.000,00 atau tercapai 98,88%.
5. Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan dengan anggaran 2019 sebesar Rp 2.280.000.000,00 dengan realisasi anggaran Rp. 1.978.208.000,00 atau tercapai sebesar 86,54%
6. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya realisasi capaian panjang irigasi dalam kondisi baik pada tahun 2019 adalah sebesar 58,17%. Anggaran program pada tahun 2019 Rp 14.375.679.000, dan anggaran yang terserap Rp 9.339.642.000,00 atau 90,28%.
7. Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya sampai dengan tahun 2019 terserap anggaran sebesar Rp 591.762.700,00 dari jumlah anggaran sebesar Rp 600.000.000,00 atau baru tercapai 98,63%

8. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan anggaran Rp 480.000.000,00 tercapai realisasi anggaran Rp 459.736.500,00 dengan persentase 95,73%
9. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur pada tahun 2019 terserap anggaran Rp 100.551.030,00 dari anggaran sejumlah Rp 110.000.000,00 atau tercapai 91,41%.
10. Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong sampai dengan tahun 2019 terserap anggaran sebesar Rp 25.228.392.500,00 dari jumlah anggaran sebesar Rp 25.488.000.000,00 atau baru tercapai 98,98%
11. Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong tahun anggaran 2019 sebesar Rp 15.796.000.000,00 dengan realisasi anggaran Rp. 15.475.736.100,00 atau tercapai sebesar 97,97%
12. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Talud/Bronjong pada tahun 2019 terserap anggaran Rp 197.399.430,00 dari anggaran sejumlah Rp 200.000.000,00 atau tercapai 98,71%.
13. Program Pengendalian Banjir pada tahun anggaran 2019 sebesar Rp 150.000.000,00 dengan realisasi anggaran Rp. 149.443.500,00
14. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur pada tahun anggaran 2019 dengan anggaran Rp 2.877.250.000,00 tercapai realisasi anggaran Rp 2.652.933.000,00 dengan persentase 89,82%
15. Program Perencanaan Pembangunan Daerah pada tahun anggaran 2019 dengan capaian sebesar 96,32 atau terealisasi sebesar Rp 19.263.000,00 dari pagu anggaran sebesar Rp 20.000.000,00

Kinerja keuangan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal berdasarkan realisasi anggaran untuk mendanai pelayanan menunjukkan bahwa pada tahun 2015 dari anggaran sebesar Rp 285.017.451.000,00 terealisasi sebesar Rp 147.278.370.000,00 atau sebesar 51,67%, tahun 2016 pagu anggaran sebesar Rp 423.248.486,00 terealisasi sebesar Rp 338.025.074.000,00 atau sebesar 79,86%. Pada tahun 2017 pagu anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal

Rp 272.722.339.000,00 terealisasi anggaran Rp 227.561.127.000,00 atau 83,44%. Pada tahun 2018 pagu anggaran Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp 227.561.127.000,00 terealisasi sebesar Rp 207.516.677.000,00 atau 91,19% serta pada tahun 2019 pagu anggaran Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp.195.815.766.000,00 terealisasi sebesar Rp. 170.969.405.408,00

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PELAYANAN

Dalam pengembangan pelayanan, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal menghadapi beberapa tantangan dan peluang sebagai berikut :

2.4.1 Tantangan

Tantangan pengembangan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal adalah :

- 1) Masih tingginya kebutuhan dukungan jaringan jalan, jembatan dan sumber daya air serta daerah yang perlu dilayani seperti daerah pertanian, pariwisata, industri dan permukiman;
- 2) Meningkatnya jumlah pengaduan masyarakat atas pelayanan publik bidang Ke-PU-an melalui media sosial;
- 3) Partisipasi masyarakat dalam pengawasan yang cenderung meningkat;
- 4) Kebijakan Pemerintah yang sinergi dengan tugas pengawasan (Pembangunan Zona Integritas);
- 5) Masih adanya pelaku jasa konstruksi yang kurang kompeten mengakibatkan kurang tertibnya penyelenggaraan jasa konstruksi.
- 6) Masih kurangnya peralatan laboratorium uji yang memadai.
- 7) Belum lengkapnya instrumen regulasi (baik Perda maupun Perbup) tata ruang.
- 8) Penyelesaian RTR yang butuh waktu karena adanya regulasi/kebijakan lintas sektoral dan kewenangan yang harus diakomodir

2.4.2 Peluang

Peluang pengembangan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal adalah :

- 1) Peraturan perUndang-undangan yang semakin ketat dalam mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang bersih untuk terciptanya transparansi, akuntabilitas dan peningkatan pelayanan publik yang harus dilaksanakan;
- 2) Komitmen pemerintah daerah yang tinggi untuk menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab melalui pencegahan dan pemberantasan KKN serta peningkatan kualitas pelayanan publik;
- 3) Tuntutan publik yang semakin kuat untuk terselenggaranya pemerintahan daerah yang bersih, dan partisipasi yang tinggi untuk ikut melaksanakan Pekerjaan Umum penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik melalui pengaduan masyarakat;
- 4) Terbukanya kerja sama yang baik dengan perangkat daerah dalam pengembangan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel melalui Zona Integritas.
- 5) Kontribusi dan keberadaan Balai Diklat Kementerian PUPR dan Balai Diklat Provinsi Jawa Tengah dalam rangka memacu peningkatan kompetensi tenaga ahli/terampil.
- 6) Dukungan asosiasi yang bergerak di bidang jasa konstruksi yang ada di wilayah Kabupaten Tegal/ditingkat Provinsi yang memberi kontribusi bagi upaya peningkatan kualitas pembangunan pekerjaan umum dan penataan ruang.
- 7) Dukungan sistem informasi yang mampu mewujudkan efisiensi, efektivitas pelaksanaan tugas kedinasan, peningkatan pelayanan publik dan kepuasan masyarakat.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal

Permasalahan didefinisikan sebagai suatu pernyataan tentang keadaan/kondisi yang belum sesuai dengan yang diharapkan, sedangkan Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan, sedangkan kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, jika tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Identifikasi isu strategis akan meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, mempermudah operasionalisasi program dan kegiatan, serta dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika birokratis.

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dapat dilihat pada tabel 3.1 :

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Layanan Infrastruktur Dasar yang Berkualitas Belum Merata	<p>Cakupan Irigasi Berkualitas Tidak Menjangkau Seluruh Wilayah</p> <p>Terbatasnya Layanan Air Minum Berkualitas Secara Merata</p> <p>Belum semua ruas jalan Kabupaten memiliki drainase jalan</p> <p>Penataan bangunan dan fisik perkotaan yang kurang maksimal dan tidak sesuai standar</p> <p>Penyedia jasa konstruksi yang sesuai standar dan bersertifikat belum tersedia dan dievaluasi berkala</p> <p>Kualitas jalan dan jembatan yang baik tidak merata</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Sarpras irigasi masih kurang - Banyaknya sarpras irigasi yang sudah tidak layak - Pengelolaan irigasi kurang maksimal - Sarpras SPAM masih terbatas - Banyak sarpras SPAM yang sudah tidak layak - Pengelolaan SPAM kurang maksimal - Kurangnya evaluasi sistem drainase saat ini - Masterplan drainase belum merata - Kurang berkualitasnya pemberian IMB - Lemahnya monitoring dan evaluasi terhadap gedung yang terbangun - Pengendalian dan pembangunan yang tidak optimal - Perencanaan pengembangan tata kota belum tersedia - Terbatasnya tenaga jasa konstruksi - Pengelolaan jalan dan jembatan yang belum optimal

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
2.	Meningkatnya Pencemaran Lingkungan Hidup	<p>Belum memiliki RDTR yang dilegalisasi</p> <p>Cakupan Layanan Limbah Rumah Tangga kurang maksimal</p> <p>Belum Optimalnya Cakupan Penanganan Sampah di Masyarakat</p> <p>Belum optimalnya cakupan layanan sampah dimasyarakat, belum semua wilayah Kabupaten Tegal terlayani, sementara volume sampah terus meningkat, disisi lain kapasitas TPA terbatas.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - RTRW masih dalam proses penetapan - Koordinasi dan penyusunan tata ruang kurang maksimal - Kurang optimalnya proses penataan ruang - Masih terdapatnya sarana dan prasarana pengelolaan limbah domestik yang belum sesuai standar - Belum optimalnya strategi kebijakan pengelolaan limbah domestik - Masih terdapatnya sarana dan prasarana pengelolaan limbah domestik yang belum sesuai standar - Kurangnya sarana dan prasarana pengelolaan sampah - Banyak sarpras pengelolaan sampah yang sudah tidak layak - Terbatasnya daya tampung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS - Terbatasnya armada pengangkut sampah dan keterbatasan daya tampung TPA Penujah

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.2.1 Visi dan Misi

Dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 disebutkan bahwa sesuai visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, maka visi Pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Tegal 2019-2024 adalah :

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tegal yang Sejahtera, Mandiri, Unggul, Berbudaya dan Berakhlak Mulia”

“Sejahtera”

Masyarakat Kabupaten Tegal yang sehat dan bahagia, mampu mengembangkan hidupnya secara layak dan bermartabat serta memiliki akses pada pemanfaatan sumber daya pembangunan secara berkeadilan dan ramah lingkungan

“Mandiri”

Masyarakat Kabupaten Tegal yang produktif, punya etos kerja tinggi, mampu mengembangkan dan memantapkan usaha ekonomi lokalnya secara mandiri

“Berakhlak mulia”

Masyarakat Kabupaten Tegal memiliki sikap dan karakter kepribadian yang arif dan bijaksana yang tercermin dalam perilaku warganya yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan spiritualitas keagamaan

“Unggul”

Masyarakat Kabupaten Tegal yang memiliki pemikiran maju, optimis, semangat belajar yang tinggi, ditunjang kemampuannya dalam berinovasi dan berkreasi untuk menghasilkan karya nyata yang bermanfaat dan berdaya saing tinggi.

“Berbudaya”

Masyarakat Kabupaten Tegal memiliki semangat gotong royong yang tinggi, berperilaku hidup bersih dan sehat serta memegang teguh nilai-nilai tradisi, kearifan dan budaya lokal.

Dalam rangka penjabaran Visi Kabupaten Tegal maka disusunlah Misi untuk **mewujudkan masyarakat Kabupaten Tegal yang Sejahtera, Mandiri, Unggul, Berbudaya, dan Berakhlak Mulia** berupa Program Unggulan berupa:

1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih, terbuka, akuntabel dan efektif melayani rakyat.
2. Memperkuat daya saing daerah melalui pembangunan infrastruktur yang andal, berkualitas dan terintegrasi serta berwawasan lingkungan.
3. Membangun perekonomian rakyat yang kokoh, maju, berkeadilan dan berkelanjutan.
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan layanan bidang pendidikan, kesehatan dan sosial dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Menciptakan tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman, tenteram dan nyaman dengan tetap menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya serta kearifan lokal.

Adapun misi yang tertuang dalam Perubahan RPJMD terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal pada misi kedua yaitu **“Memperkuat daya saing melalui pembangunan infrastruktur yang handal, berkualitas dan terintegrasi serta berwawasan lingkungan”**.

Faktor penghambat dan faktor pendorong yang dihadapi Dinas Pekerjaan Umum dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada tabel 3.2 berikut ini :

Tabel 3.2

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)
<p>Misi kedua : Memperkuat daya saing melalui pembangunan infrastruktur yang andal, berkualitas dan terintegrasi serta berwawasan lingkungan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarpras irigasi yang masih kurang; 2. Banyaknya sarpras irigasi yang sudah tidak layak; 3. Pengelolaan irigasi kurang maksimal 4. Sarpras SPAM masih terbatas; 5. Banyak sarpras SPAM yang sudah tidak layak; 6. Pengelolaan SPAM kurang maksimal; 7. Kurangnya evaluasi sistem drainase saat ini; 8. Masterplan drainase belum merata; 9. Kurang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mekanisme pengawasan dan evaluasi program harus berbasis <i>outcome</i>; 2. Penggunaan sarana transportasi jalan dan jembatan yang meningkat. 3. Belum lengkapnya data base untuk masing-masing bidang ; 4. Tuntutan masyarakat terhadap hasil pembangua. 5. Terbatasnya sarana dan prasarana persampahan; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya integrasi program dan kegiatan di RPJMD 2. Partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan jalan 3. Dukungan pemanfaatan teknologi informasi sebagai bagian dari e-government 4. Partisipasi masyarakat yang tinggi untuk ikut melaksanakan penyelenggaraan pelayanan publik dengan kesadaran dan keberanian menyampaikan

Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
<p>Program Unggulan :</p> <p>Penguatan Jaringan Infrastruktur dan Jalan Bebas Lubang serta Pengembangan Wilayah</p>	<p>berkualitasnya pemberian IMB</p> <p>10. Lemahnya monitoring dan evaluasi terhadap gedung yang terbangun;</p> <p>11. Pengendalian dan pembangunan yang tidak optimal;</p> <p>12. Perencanaan pengembangan tata kota belum tersedia</p> <p>13. Terbatasnya tenaga jasa konstruksi;</p> <p>14. Pengelolaan jalan dan jembatan yang belum optimal;</p> <p>15. RTRW masih dalam proses penetapan;</p> <p>16. Koordinasi dan penyusunan tata ruang kurang maksimal;</p> <p>17. Kurang optimalnya proses penataan ruang;</p> <p>18. Masih terdapatnya sarana dan prasarana pengelolaan limbah domestik yang belum sesuai standar;</p>		<p>pengaduan masyarakat.</p> <p>5. Adanya sinergitas pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan sampah.</p>

Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
	19. Belum optimalnya strategi kebijakan pengelolaan limbah domestik; 20. Kurangnya sarana dan prasarana pengelolaan sampah; 21. Banyak sarpras pengelolaan sampah yang sudah tidak layak; 22. Terbatasnya daya tampung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS; 23. Jumlah infrastruktur yang tersedia belum memadai;		


3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.3.1 Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Tujuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merupakan rumusan kondisi yang hendak dituju di akhir periode perencanaan yang merupakan penjabaran dari visi serta dilengkapi dengan rencana sasaran strategis yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran nasional yang tertuang dalam RPJMN tahun 2020-2024, secara umum adalah menyelenggarakan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan tingkat dan kondisi ketersediaan, keterpaduan, serta kualitas dan cakupan pelayanan yang produktif dan cerdas, berkeselamatan, mendukung kesehatan

masyarakat, menyeimbangkan pembangunan, memenuhi kebutuhan dasar, serta berkelanjutan yang berasaskan gotong royong guna mencapai masyarakat yang lebih sejahtera. Tujuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yaitu :

1. Peningkatan ketersediaan dan kemudahan akses serta pemanfaatan air untuk memenuhi kebutuhan domestik, peningkatan produktivitas pertanian dan pengembangan energi, industri dan sektor ekonomi unggulan.
2. Peningkatan kelancaran konektivitas dan akses jalan yang lebih merata bagi peningkatan pelayanan sistem logistik nasional yang lebih efisien dan penguatan daya saing.
3. Peningkatan permukiman berkualitas yang semakin merata dengan pemanfaatan dan pengelolaan yang partisipatif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
4. Pemenuhan kebutuhan perumahan yang semakin merata untuk mencapai peningkatan kualitas hidup masyarakat.
5. Peningkatan pelayanan infrastruktur sesuai dengan potensi dan upaya pengembangan wilayah pada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan kawasan strategis.
6. Peningkatan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan yang terbangun dan terkelola dengan berbagai skema pembiayaan yang lebih efisien dan berkelanjutan.
7. Peningkatan daya saing jasa konstruksi nasional serta peningkatan mutu, keselamatan, keamanan dan keberlanjutan dalam penyelenggaraan dan hasil jasa konstruksi.
8. Peningkatan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur yang bersih dan terpercaya.
9. Peningkatan SDM aparatur Kementerian PUPR yang berkinerja tinggi.
10. Peningkatan efektivitas penyelenggaraan pembangunan infrastruktur.



Berdasarkan telaah Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk urusan pekerjaan umum, adapun faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan, ditunjukkan pada tabel 3.3 berikut :

Tabel 3.3

Permasalahan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian PUPR beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

Sasaran Jangka Menengah K/L	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Meningkatnya dukungan konektivitas bagi penguatan daya saing	<ol style="list-style-type: none">1. Belum optimalnya koordinasi dengan instansi terkait;2. Kondisi jalan, jembatan dan irigasi belum seluruhnya dalam kondisi baik;3. Data base jalan, jembatan serta irigasi yang tidak lengkap dan <i>up to date</i> sehingga mempersulit fungsi pemeliharaan;4. Jumlah infrastruktur yang tersedia belum memadai.	<ol style="list-style-type: none">1. Keterpaduan antar program/antar sektor yang berbeda sumber pendanaannya masih belum optimal2. Kondisi jalan nasional sudah mencapai tingkat kemantapan yang relatif tinggi, sedangkan kondisi jalan daerah belum mampu mendukung fungsi jalan nasional. Tingkat kemantapan jalan daerah masih pada kisaran 70%. Padahal, sebagai sebuah sistem jaringan, jalan daerah memegang peran yang tidak kalah penting dari jalan nasional.	<ol style="list-style-type: none">1. Keterpaduan tujuan dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata untuk keseimbangan pembangunan antar daerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan.2. Dukungan pembangunan infrastruktur pada penyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan umum untuk konektivitas nasional guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim, dengan sasaran strategis meningkatnya kemantapan jalan

Sasaran Jangka Menengah K/L	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
			nasional.

3.3.2 Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah

3.3.2.1 Telaahan Renstra Kementerian LHK

Tujuan KLHK merupakan penjabaran dari visi dan misi KLHK yang memuat harapan yang akan dicapai secara umum dan selanjutnya dirinci ke dalam sasaran strategis KLHK. Adapun rumusan tujuan KLHK yaitu:

1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kehutanan serta ketahanan terhadap perubahan iklim;
2. Meningkatkan pemanfaatan potensi ekonomi dari sumber daya hutan dan lingkungan hidup;
3. Meningkatkan akses kelola hutan bagi masyarakat baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara dengan tetap menjaga keberadaan dan kelestarian fungsi hutan;
4. Meningkatkan tata kelola, inovasi dan daya saing bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Sasaran strategis pembangunan KLHK adalah kondisi yang ingin dicapai oleh KLHK pada akhir periode perencanaan yakni suatu capaian indikator kinerja pada tataran dampak (impact) sebagai akibat kumulatif dari terealisasinya program pembangunan yang telah dilaksanakan oleh seluruh unit kerja lingkup KLHK selama tahun 2020-2024.

Adapun rumusan sasaran strategis untuk tingkat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) adalah:

1. Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tangga terhadap perubahan iklim dengan indikator yaitu: (1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), (2)

Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang terverifikasi pada Sektor Kehutanan dan Limbah, (3) Penurunan laju Deforestasi, (4) Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS), (5) Luas lahan dalam DAS yang dipulihkan kondisinya, dan (6) Luas kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (HCV - *High Conservation Values*);

2. Tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, dengan indikator yaitu: (1) Kontribusi Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap PDB Nasional, (2) Nilai Ekspor Hasil Hutan, TSL dan *Bioprospecting*, dan (3) Peningkatan Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Fungsional KLHK;
3. Terjaganya keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan, dengan indikator yaitu: (1) Luas kawasan hutan dengan Status Penetapan, (2) Luas Kawasan Hutan yang dilepas untuk TORA (Tanah Objek Reforma Agraria), dan (3) Luas Kawasan Hutan yang Dikelola oleh Masyarakat;
4. Terselenggaranya Tata Kelola dan Inovasi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang baik serta kompetensi SDM LHK yang berdaya saing, dengan indikator yaitu: (1) Indeks Efektivitas Pengelolaan Kawasan hutan, (2) Jumlah Kasus LHK yang ditangani melalui Penegakan Hukum, (3) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks-SPBE), (4) Hasil Litbang yang Inovatif dan/atau Implementatif, (5) Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi, (6) Opini WTP atas Laporan Keuangan KLHK, (7) Indeks Produktivitas dan Daya Saing SDM LHK, dan (8) Level Maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) KLHK.

Memperhatikan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun

2020 – 2024, pada prinsipnya sasaran strategi dan kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tersebut akan menjadi salah satu faktor pendorong atas peningkatan kualitas pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal, dikarenakan kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tersebut mendukung penyelesaian permasalahan lingkungan hidup di Kabupaten Tegal.

Tabel 3.4

Permasalahan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal berdasarkan Sasaran Renstra KLHK beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No.	Sasaran Strategis Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tangga terhadap perubahan iklim	Penyediaan data, informasi dan dokumen kajian lingkungan.	Terbatasnya anggaran dan SDM pendukung pelayanan DLH Kabupaten Tegal	Adanya komitmen kepala daerah dalam pembangunan berkelanjutan
		Pengelolaan persampahan dan limbah B3.	Terbatasnya sarana dan prasarana persampahan	Adanya sinergitas pemerintah, dan masyarakat dalam pengelolaan sampah
		Pemantauan kualitas air, udara dan tutupan Lahan	Belum tersedianya laboratorium lingkungan terakreditasi	Pengalokasian Anggaran dan Penguatan Komitmen Kepala Dinas LH
2	Tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan	Belum optimalnya identifikasi keanekaragaman hayati.	Tidak tersedianya data identifikasi keanekaragaman hayati	Mengoptimalkan sistem informasi daring (online)
3	Terjaganya keberadaan, fungsi dan	Penguatan kapasitas kelembagaan	Masih lemahnya penegakan hukum dan	Adanya penghargaan /reward dan

No.	Sasaran Strategis Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan	masyarakat dan Edukasi dalam pengelolaan lingkungan hidup.	kurangnya kesadaran masyarakat di bidang lingkungan hidup.	sosialisasi dalam pengelolaan lingkungan hidup
4	Terselenggaranya Tata Kelola dan Inovasi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang Baik serta Kompetensi SDM LHK yang BerdayaSaing	Penegakan hukum lingkungan hidup.	Masifnya Pembangunan yang sering kali mengeksploitasi sumber daya alam dan mengabaikan kelestarian lingkungan	Tersedianya Regulasi bidang lingkungan hidup

3.3.3 Telaah Renstra pada Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah

Telaah Renstra Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah mengacu pada Renstra Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah untuk urusan bidang kebinamargaan.

3.3.3.1 Kondisi, Potensi dan Permasalahan Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah

Total Panjang jalan di wilayah Provinsi Jawa Tengah adalah 26.368,792 km, terdiri dari jalan nasional sepanjang 1.390,571 km, jalan provinsi 2.565,621 km dan jalan kabupaten/kota sepanjang 22.412,600 km. Panjang jalan Provinsi Jawa Tengah sepanjang 2.565,621 km terdiri dari 263 ruas. Capaian kondisi jalan pada akhir tahun 2013, jalan baik 86,70%, jalan sedang 13,04%, dan jalan rusak 0,26%. Sedangkan jembatan baik 79,00%, jembatan sedang 20,11% dan jembatan rusak 0,89%. Daya dukung jalan provinsi masih belum optimal, mengingat terdapat alih status jalan kabupaten menjadi jalan provinsi yang lebarnya < 6,00 m (3,5 m – 5,0 m) sepanjang 1.271,420 km.

Permasalahan sistem jaringan jalan dan spesifikasi penyediaan prasarana jalan antara jalan nasional, provinsi dan kabupaten/kota pada beberapa koridor lintas belum sinergis, sehingga memberikan kendala pada sarana transportasi yang dipergunakan. Beberapa permasalahan jalan dan jembatan di Provinsi Jawa Tengah yang kondisinya belum memenuhi standar pelayanan minimal diantaranya:

- a. Kapasitas jalan dan jembatan yang belum memenuhi standar teknis pelayanan minimal yaitu lebar jalan dan jembatan.
- b. Kualitas jalan dan jembatan yang belum memenuhi standar pelayanan minimal yaitu: struktur jalan yang belum memenuhi standar jalan kolektor sekunder (MST 8 ton), struktur jembatan yang belum memenuhi beban standar Ditjen Bina Marga.
- c. Daerah-daerah tertentu yang berpotensi rawan longsor/banjir, yaitu daerah dengan struktur asli yang labil, daerah perbukitan yang rawan terjadinya longsor, dan daerah genangan banjir.

3.3.3.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah meliputi:

- a. Mempertahankan kondisi jalan dan jembatan agar selalu dalam kondisi baik.
- b. Meningkatkan kapasitas jalan dan jembatan.
- c. Meningkatkan kualitas struktur jalan dan jembatan.
- d. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendukung kebinamargaan.
- e. Meningkatkan kapasitas dan kualitas aparatur kebinamargaan.

Sasaran Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah meliputi:

- a. Meningkatnya kinerja pelayanan jalan.
- b. Meningkatnya kapasitas jalan dan jembatan untuk melayani pertumbuhan lalu lintas.
- c. Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan sesuai dengan standarisasi jalan provinsi.

- d. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung kebinamargaan sesuai dengan kebutuhan untuk peningkatan kinerja penanganan jalan.
- e. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pelayanan sesuai tupoksi.

3.3.4 Telaah Renstra pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah. Permasalahan yang dihadapi Jawa Tengah dalam pembangunan infrastruktur adalah belum optimalnya kualitas pelayanan infrastruktur yang sejalan dengan dinamika aktivitas kehidupan masyarakat baik sosial, ekonomi, budaya, politik dan pengembangan wilayah.

Permasalahan tersebut ditandai yaitu : Infrastruktur Fisik, terkait dengan Pekerjaan Umum antara lain belum optimalnya kualitas dan kapasitas serta kondisi jalan dan jembatan untuk mendukung daya saing wilayah, utamanya untuk kewenangan Provinsi dan Kabupaten/Kota belum optimalnya kondisi prasarana sarana sumber daya air, terkait dengan kondisi jaringan irigasi yang belum sepenuhnya dalam kondisi baik untuk menunjang peningkatan produktivitas pertanian utamanya irigasi kewenangan Kabupaten/Kota; daya dukung dan tampung drainase serta sungai yang sudah tidak memadai; ketersediaan tampungan air baku yang belum merata dan dalam kondisi yang belum optimal sehingga masih terdapat wilayah yang mengalami kekeringan; rendahnya akses masyarakat terhadap air minum terlindungi dan rendahnya pelayanan sanitasi layak; rendahnya pengelolaan jasa konstruksi.

Berdasarkan telaah Renstra Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah untuk urusan pekerjaan umum/kebinamargaan dan Dinas

Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah untuk urusan sumber daya air, adapun faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan, ditunjukkan pada tabel 3.5.

Tabel 3.5

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan terhadap Sasaran Jangka Menengah Renstra Provinsi

Sasaran Jangka Menengah Renstra Provinsi	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
<p>1. Meningkatnya kualitas, kapasitas jalan dan jembatan sesuai dengan standarisasi jalan provinsi untuk melayani pertumbuhan lalu lintas</p> <p>2. Meningkatnya kondisi baik sarana dan prasarana jaringan irigasi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah</p>	<p>1. Belum optimalnya koordinasi dengan instansi terkait;</p> <p>2. Kondisi jalan, jembatan dan irigasi belum seluruhnya dalam kondisi baik;</p> <p>3. Data <i>base</i> jalan, jembatan serta irigasi yang tidak lengkap dan <i>up to date</i> sehingga mempersulit fungsi pemeliharaan;</p> <p>Jumlah infrastruktur yang tersedia</p>	<p>1. Kualitas jalan dan jembatan yang belum memenuhi standar pelayanan minimal yaitu: struktur jalan yang belum memenuhi standar jalan kolektor sekunder (MST 8 ton), struktur jembatan yang belum memenuhi beban standar Ditjen Bina Marga.</p> <p>2. Sistem jaringan jalan dan spesifikasi</p>	<p>1. SK jalan sesuai kewenangan (kabupaten/provinsi/nasional) sebagai acuan dalam penanganan dan penyediaan prasarana jalan</p> <p>2. Mendukung pemantapan ketahanan sumber daya air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energi guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi.</p> <p>3. Penyelesaian</p>

Sasaran Jangka Menengah Renstra Provinsi	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
	<p>belum memadai.</p>	<p>penyediaan prasarana jalan antara jalan nasional, provinsi dan kabupaten/kota pada beberapa koridor lintas belum sinergis.</p> <p>3. Terbatasnya sumber daya manusia, lemahnya pengendalian, pengawasan dan penegakan hukum dalam upaya pelestarian fungsi dan layanan sumber daya air.</p> <p>4. Pemahaman terhadap pedoman penyelenggaraan penataan ruang masih lemah;</p>	<p>penetapan RTRW Nasional sehingga dapat diacu oleh RTRW Provinsi dan RTRW Kab/Kota</p> <p>4. Dukungan Pemerintah Pusat dalam keterpaduan program pemanfaatan ruang wilayah Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota serta pelaksanaan kelembagaan lintas sektoral dan lintas wilayah.</p>

Sasaran Jangka Menengah Renstra Provinsi	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		5. Penyelesaian RTR yang membutuhkan waktu dikarenakan adanya kebijakan-kebijakan lintas sektoral dan kewenangannya yang harus diakomodir.	

3.3.5 Telaahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah

Penelaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan, sesuai dengan periode kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023. Proses telaah tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan BAPPEDA yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023.

Sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, visi pembangunan daerah jangka menengah Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023, adalah : Visi dan Misi Gubernur Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 dan mengacu kepada tugas dan fungsi, maka Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah mendukung terlaksananya visi dan misi Gubernur terutama di Misi Ketujuh.

Misi Ketujuh: **Meningkatkan Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan Jawa Tengah yang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan.** Tujuan yang hendak dicapai Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah selama periode 2018-2023 adalah:

1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup berkelanjutan di Jawa Tengah, dengan sasaran sebagai berikut:
 - 1) Menurunnya pencemaran air permukaan;
 - 2) Menurunnya pencemaran udara;.
2. Meningkatkan pengelolaan sumber daya hutan/lahan secara lestari, dengan sasaran sebagai berikut:
 - 1) Meningkatnya LUASAN TUTUPAN VEGETASI (LTV)
 - 2) Meningkatnya PDRB sub sektor Kehutanan.
3. Meningkatkan kualitas aparatur dan pelayanan publik, dengan sasaran meningkatnya kinerja Aparatur

Tabel 3.6

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan terhadap Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Lingkungan Hidup & Kehutanan Provinsi Jawa Tengah

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra DLHK Provinsi Jateng	Permasalahan Pelayanan SKPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Menurunnya pencemaran air permukaan;	Pengelolaan persampahan dan limbah B3.	Terbatasnya sarana dan prasarana persampahan	Adanya sinergitas pemerintah, dan masyarakat dalam pengelolaan sampah
2	Menurunnya pencemaran udara	Pemantauan kualitas air, udara dan tutupan Lahan	Belum tersedianya laboratorium lingkungan terakreditasi	Pengalokasian Anggaran dan Penguatan Komitmen Kepala Dinas LH
3	Meningkatnya LUASAN TUTUPAN VEGETASI (LTV)	Belum optimalnya identifikasi keanekaragaman hayati.	Tidak tersedianya data identifikasi keanekaragaman hayati	Mengoptimalkan sistem informasi daring (online)

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra DLHK Provinsi Jateng	Permasalahan Pelayanan SKPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		Penyediaan data, informasi dan dokumen kajian lingkungan.	Terbatasnya anggaran dan SDM pendukung pelayanan DLH Kabupaten Tegal	Adanya komitmen kepala daerah dalam pembangunan berkelanjutan
4	Meningkatnya PDRB sub sektor Kehutanan.	Penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat dan Edukasi dalam pengelolaan lingkungan hidup.	Masih lemahnya penegakan hukum dan kurangnya kesadaran masyarakat di bidang lingkungan hidup.	Adanya penghargaan /reward dan sosialisasi dalam pengelolaan lingkungan hidup
5	Meningkatnya kinerja Aparatur	Penegakan hukum lingkungan hidup.	Maraknya Pembangunan Infrastruktur yang sering kali mengeksploitasi sumber daya alam dan mengabaikan kelestarian lingkungan	Tersedianya Regulasi bidang lingkungan hidup

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Pada RPJMD Kabupaten Tegal

3.4.1 Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal

Dalam Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal Tahun 2012-2032, terkait dengan Tupoksi Dinas Pekerjaan Umum, dijabarkan bahwa Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Wilayah meliputi jaringan jalan dan jembatan terdiri atas jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, dan jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan. Sedangkan Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Sumber Daya Air untuk kewenangan kabupaten terdapat DI Kabupaten sejumlah 169 unit.

Tinjauan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tegal diperlukan sebagai upaya sinkronisasi antara rencana tata

ruang dengan rencana pembangunan. Dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal sinkronisasi tersebut bertujuan untuk mengintegrasikan antara tata ruang wilayah dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan. Peran dan fungsi yang cukup besar terhadap keberhasilan pencapaian seluruh kebijakan penataan ruang yang mencakup bidang bangunan gedung dan perumahan dan permukiman yang terkait dengan kebijakan penataan ruang di dalam RTRW pada kebijakan pengembangan dan pemantapan fungsi pusat pelayanan yang terkoneksi dengan sistem prasarana wilayah dalam rangka pengurangan kesenjangan antar wilayah dan berkelanjutan pembangunan.

Identifikasi isu-isu strategis kemudian dipertajam dengan tinjauan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan atau kebijakan rencana atau program dan KLHS wajib disertakan dalam penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal yang berpotensi menimbulkan dampak dan atau resiko lingkungan hidup.

Adapun rencana struktur ruang di dalam RTRW Kabupaten Tegal Tahun 2012-2032 yang terkait dengan urusan wajib Lingkungan Hidup adalah Rencana Sistem Jaringan Prasarana Pengelolaan Lingkungan terdiri atas:

1. Pengelolaan persampahan;

Pengelolaan persampahan meliputi:

- a. pelayanan persampahan di setiap ibukota kecamatan sesuai kebutuhan dan karakteristik wilayah;
- b. optimalisasi pelayanan persampahan perkotaan meliputi:
 - 1) Revitalisasi TPA Penujah di Kecamatan Kedungbanteng.

- 2) Sistem pengelolaan dan teknologi persampahan yang dilakukan dengan *sanitary landfill*;
- 3) Pemilahan sampah organik dan anorganik di tingkat rumah tangga; dan pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu di setiap kecamatan.

2. Pengelolaan air limbah.

Pengelolaan air limbah meliputi:

- a) pengembangan saluran pembuangan air limbah dalam sistem instalasi pengolahan air limbah pada kawasan industri;
- b) pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun pada kawasan industri; dan
- c) pengelolaan limbah secara komunal di kawasan padat penduduk.

Permasalahan pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Tegal yaitu adanya beberapa program pembangunan belum mengacu kepada RTRW yang mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Untuk mengatasi hal tersebut perlu peningkatan sinkronisasi antara perencanaan pembangunan (baik tahunan maupun lima tahunan) dengan RTRW.

Peninjauan KLHS dalam penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal bertujuan agar program/kegiatan yang diusulkan telah mempertimbangkan pembangunan yang berkelanjutan yang berupa kajian pengaruh rencana program dan langkah-langkah mitigasi/adaptasi sebagai upaya meminimalkan potensi dampak terhadap lingkungan.

Tabel 3.7

Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS pada RPJMD

Kebijakan RTRW/KLHS	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
1. RTRW Kab.Tegal : 2. KHLS	1 . RTR belum sepenuhnya menjadi acuan	Penghambat : 1. Penyelesaian RTR yg

Kebijakan RTRW/KLHS	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
<p>a. Kemiskinan (kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, kependudukan)</p> <p>b. Alih fungsi lahan.</p> <p>c. Pencemaran dan kerusakan lingkungan.</p> <p>d. Rendahnya kualitas sarana prasarana.</p> <p>e. Penurunan kualitas lingkungan (banjir, kekeringan, tanah longsor, gempa bumi, gelombang pasang, kebakaran lahan).</p> <p>f. Rencana Sistem Jaringan Prasarana Pengelolaan Lingkungan Pelayanan Persampahan.</p> <p>g. Rencana Sistem Jaringan Prasarana Pengelolaan Lingkungan Pelayanan Pengelolaan Air Limbah</p>	<p>dalam pembangunan seperti infrastruktur</p> <p>1 Fungsi kelembagaan belum berperan secara maksimal.</p> <p>3. Keterbatasan sarana dan prasarana sekaligus kurangnya ketersediaan lahan TPS, TPST dan TPA.</p> <p>4. Keterbatasan lahan lokasi pelayanan pengelolaan air limbah.</p>	<p>membutuhkan waktu karena adanya regulasi / kebijakan lintas sektor dan kewenangan yang harus diakomodir</p> <p>2. Kurangnya dukungan anggaran, personil dan materi teknis yang substantif)</p> <p>3. Masih kurangnya pemahaman dan partisipasi masyarakat/ stakeholder dalam penataan ruang.</p> <p>4. Luas dan padatnya wilayah layanan.</p> <p>5. Kurangnya kesadaran pelaku usaha dan/kegiatan.</p> <p>Pendorong :</p> <p>1. Optimalisasi anggaran, SDM maupun sumber daya lainnya.</p> <p>2. Upaya percepatan melalui koordinasi lintas sektor yang lebih intensif.</p> <p>3. Adanya rencana pengelolaan sampah dengan sistem RDF.</p> <p>4. Telah disusunnya dokumen RTRW dan Perda tentang Pengelolaan Air Limbah.</p>


Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan, telaah terhadap visi dan misi serta mempertimbangkan isu strategis dalam RPMJN, Renstra Kementerian PU dan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Tengah, serta hasil sinkronisasi program yang terdapat dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

Tegal tahun 2012 – 2024, maka dapat disusun hasil analisa SWOT DPU Kabupaten Tegal, sebagai berikut :

Tabel 3.8
Tabel Hasil Analisa SWOT

	Kekuatan (S)	Kelemahan (W)
Faktor Internal	1) Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Tegal Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum 2) Jumlah aparatur baik PNS non PNS di DPU sangat memadai 3) Besarnya Anggaran DPU yang cukup Besar 4) Struktur Organisasi DPU mempunyai UPTD di wilayah Kecamatan	a) Kurangnya Aparatur yang menguasai keahlian Teknis khususnya dalam perencanaan dan pengawasan teknis b) Pola penempatan pegawai yang belum sesuai dengan pengalaman dan latar belakang pendidikan c) Belum tersedianya Sistem Data base Infrastruktur d) Sarana dan prasarana penunjang operasionalisasi pemeliharaan jalan, jembatan dan drainase masih kurang memadai baik secara kualitas maupun kuantitas
Faktor Eksternal		
Peluang (O)	Strategi (SO)	Strategi (WO)
a) Adanya "Musrenbang" untuk menjaring aspirasi masyarakat secara berjenjang yang dilaksanakan	1) Daya gunakan Tupoksi Dinas dengan Peningkatan peran dan Kinerja UPTD dalam pemenuhan	

<p>setiap tahun</p> <p>b) Adanya akses ke Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat untuk meraih dana pembangunan</p> <p>c) Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) dalam rangka untuk meningkatkan mutu Infrastruktur</p>	<p>kebutuhan masyarakat</p> <p>2) Daya gunakan Tupoksi Dinas Peningkatan kelengkapan dokumen perencanaan dalam pengusulan anggaran infrastruktur yang bersumber dari Pusat maupun Provinsi</p> <p>3) Daya gunakan Keberadaan TP4D dalam upaya penggunaan anggaran untuk pembangunan infrastruktur melalui pendampingan kegiatan dari mulai perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan</p>	
Ancaman (T)	Strategi (ST)	Strategi (WT)
<p>1) Banyaknya keluhan /Tuntutan masyarakat terhadap kondisi infrastruktur Jalan</p> <p>2) Banyaknya Ruas Jalan yang dimensinya belum memadai</p> <p>3) Kedisiplinan/ Kinerja Pihak Ketiga/ Rekanan</p>		



Kerja dalam penyelesaian pekerjaan belum optimal		
--------------------------------------------------	--	--

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Penentuan isu-isu strategis mutlak menjadi bagian dalam suatu proses perencanaan. Keberhasilan mengidentifikasi isu-isu strategis dengan tepat pada gilirannya akan membuat perencanaan disusun menjadi tepat sasaran, efektif, dapat diterima oleh pihak-pihak terkait, dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal-hal yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, apabila tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka . panjang. Di samping itu suatu isu strategis merupakan hal-hal yang bersifat mendasar, jangka panjang, mendesak, serta menentukan tujuan di masa yang akan datang.

Metode penentuan isu-isu strategis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal dilakukan dengan cara :

1. Menyelenggarakan *Focussed Group Discussion* (FGD) yang melibatkan seluruh unsur Bidang/UPTD/ di Dinas Pekerjaan Umum, dan OPD, serta unsur-unsur yang terkait dengan urusan Pekerjaan Umum dengan format Forum SKPD Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal;
2. Menggunakan analisis SWOT (*strength, weakness, opportunities, threats*) yang dikelompokkan menjadi 4 (empat) kelompok strategi sebagai berikut :
 - a. Strategi *Strength-Opportunities* (SO), yaitu strategi untuk memaksimalkan kekuatan dengan memanfaatkan peluang yang ada.
 - b. Strategi *Strength-Threats* (ST), yaitu strategi menggunakan kekuatan untuk mencegah dan mengatasi ancaman serta mengubahnya menjadi peluang.

- c. Strategi *Weakness-Opportunity* (WO), yaitu strategi memperkecil kelemahan dengan memaksimalkan peluang yang ada.
- d. Strategi *Weakness-Threats* (WT), yaitu strategi memperkecil kelemahan untuk mencegah dan mengatasi ancaman.

Penentuan isu-isu strategis pelayanan perangkat daerah dilakukan dengan menggunakan metode *Focused Group Discussion* (FGD). Berdasarkan hasil FGD ditetapkan isu strategis pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pemerataan dan kualitas pembangunan jalan;
2. Belum optimalnya kondisi dan kualitas jembatan yang memenuhi standar teknis;
3. Belum optimalnya pengelolaan dan penyediaan jaringan irigasi.
4. Belum terwujudnya pembinaan dan pengawasan jasa konstruksi.
5. Masih tingginya laju perubahan alih fungsi lahan dan kurang taatnya terhadap RTRW karena berbagai kepentingan.
6. Terjadinya pelanggaran tata ruang dan belum tertangani dengan baik
7. Ketaatan terhadap RTRW dan RDTR dalam hal struktur ruang, pola ruang dan indikasi program belum optimal.
8. Pelanggaran tata ruang yang diakibatkan masyarakat dan stakeholder kurang memahami tentang RTR.
9. Belum adanya kesesuaian RTRW yang menjadi acuan dalam penyusunan program-program pembangunan dan panduan bagi masyarakat untuk memanfaatkan ruang yang sesuai RTR.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum dalam periode tahun 2019-2024 adalah **“Meningkatkan infrastruktur wilayah yang mantap ”**.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program Perangkat Daerah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran, dirancang pula indikator sasaran. Indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan, di mana pada setiap indikator sasaran selalu disertai dengan rencana tingkat capaiannya (target) masing-masing. Tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator sasaran dan target kinerja sasaran dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Tegal 2019-2024 (Renstra Murni)

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Formulasi/Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian				
						2018	2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan prasarana jalan dan jembatan kabupaten	Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan kabupaten	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik dibagi panjang seluruh jalan kabupaten di daerah tersebut dikali seratus persen	%	62.42	70.02	77.62	85.22	92.82	100.00
			Persentase jalan yang memiliki drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5)	Panjang jalan yang memiliki drainase (Km) dibagi panjang seluruh jalan kabupaten (Km) dikali seratus persen	%	14.30	14.30	14.30	14.30	14.30	14.30
		Meningkatnya kualitas infrastruktur jembatan kabupaten	Persentase jembatan kabupaten dalam kondisi baik	Jembatan kondisi baik dibagi jembatan seluruhnya	%	67.11	73,51	79.91	86.31	92.71	100.00
2	Meningkatkan pengelolaan dan penyediaan jaringan irigasi dalam kondisi baik	Meningkatnya pelayanan dan ketersediaan jaringan irigasi	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik dibagi luas irigasi kabupaten dikali seratus persen	%	56.39	66.40	74.80	83.20	91.60	100.00

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Formulasi/Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian				
						2018	2020	2021	2022	2023	2024
3	Meningkatkan manajemen administrasi pelayanan umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan	Meningkatnya manajemen administrasi pelayanan umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan	Tingkat penyelesaian administrasi pelayanan umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan	Jumlah kegiatan yang terlaksana dibagi jumlah kegiatan perangkat daerah dikali seratus persen	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Tabel 4.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Tegal 2019-2024 (Renstra Terbatas)

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Formulasi/Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian				
						2018	2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan prasarana jalan dan jembatan kabupaten	Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan kabupaten	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik dibagi panjang seluruh jalan kabupaten di daerah tersebut dikali seratus persen	%	62.42	70.02	77.62	85.22	92.82	100.00
			Persentase jalan yang memiliki drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5)	Panjang jalan yang memiliki drainase (Km) dibagi panjang seluruh jalan kabupaten (Km) dikali seratus persen	%	14.30	14.30	14.30	14.30	14.30	14.30
		Meningkatnya kualitas infrastruktur jembatan kabupaten	Persentase jembatan kabupaten dalam kondisi baik	Jembatan kondisi baik dibagi jembatan seluruhnya	%	67.11	73,51	79.91	86.31	92.71	100.00

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Formulasi/Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian				
						2018	2020	2021	2022	2023	2024
2	Meningkatkan pengelolaan dan penyediaan jaringan irigasi dalam kondisi baik	Meningkatnya pelayanan dan ketersediaan jaringan irigasi	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik dibagi luas irigasi kabupaten dikali seratus persen	%	56.39	66.40	74.80	83.20	91.60	100.00
3	Meningkatkan manajemen administrasi pelayanan umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan	Meningkatnya manajemen administrasi pelayanan umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan	Tingkat penyelesaian administrasi pelayanan umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan	Jumlah kegiatan yang terlaksana dibagi jumlah kegiatan perangkat daerah dikali seratus persen	%	100	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
		Meningkatnya pembinaan dan pengawasan jasa konstruksi	Persentase penyedia jasa konstruksi memenuhi standar kualifikasi	Dihitung berdasarkan kemampuan memfasilitasi pelaksanaan pelatihan tenaga terampil dibanding dengan jumlah peminat keseluruhan	%	-	10.00	22.00	38.50	47.00	57.00

Tabel 4.3

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah (Renstra 2019-2024 Perubahan)

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan/Sasaran				
					2020	2021	2022	2023	2024	
1	Meningkatkan Infrastruktur Wilayah dan Permukiman yang Mantap		Persentase Infrastruktur Pekerjaan Umum yang Mantap	Persentase	72,88	74,88	78,80	81,66	83,59	
		Meningkatnya Infrastruktur Sumber Daya Air yang Mantap	Persentase Infrastruktur Sumber Daya Air yang Mantap	Persentase						
			Rasio Ketersediaan Jaringan Irigasi pada Daerah Irigasi (DI) Kewenangan Kabupaten	Persentase	58,86	60,10	61,33	62,57	63,80	
		Meningkatnya Infrastruktur Kebinamargaan yang Mantap	Persentase Infrastruktur Kebinamargaan yang Mantap	Persentase						
			Persentase Ketersediaan Jaringan Drainase di Jalan Kewenangan Kabupaten	Persentase	58,42	61,42	61,79	62,15	62,52	
			Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam kondisi mantap	Persentase	81,11	82,50	84,00	85,50	87,50	

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan/Sasaran				
					2020	2021	2022	2023	2024	
			Proporsi Jembatan dalam Kondisi Mantap	Persentase	88,05	89,50	91,00	92,00	93,50	
		Meningkatnya Infrastruktur Keciptakarya yang Mantap	Persentase Infrastruktur Keciptakarya yang Mantap	Persentase						
			Cakupan Akses Layanan Air Minum	Persentase	61,09	63,32	65,55	67,77	70,00	
			Rasio Ketersediaan Sarpras Persampahan	Persentase	0,00	80,00	82,00	83,00	85,00	
			Cakupan Akses Sanitasi/Air Limbah Domestik	Persentase	94,37	95,17	95,57	95,97	96,37	
			Rasio Bangunan Negara yang Sesuai Standar Teknis	Persentase	76,88	78,00	79,12	80,24	81,36	
			Rasio Bangunan yang Memiliki IMB	Persentase	6,50	7,49	8,01	8,57	9,15	
			Rasio Bangunan dan Lingkungan yang Tertata	Persentase	0,00	10,00	60,00	91,11	100	
		Meningkatnya Jumlah Penyedia Jasa Konstruksi yang Kompetitif	Persentase Jumlah Penyedia Jasa Konstruksi yang Kompetitif	Persentase						

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan/Sasaran			
					2020	2021	2022	2023	2024
			Rasio Tenaga Konstruksi yang Terlatih	Persentase	0,00	60,00	80,00	80,00	80,00
		Meningkatnya Kepatuhan terhadap Kesesuaian Pemanfaatan Ruang untuk Pembangunan	Persentase Kepatuhan terhadap Kesesuaian Pemanfaatan Ruang untuk Pembangunan	Persentase					
			Rasio kepatuhan terhadap ITR yang diajukan	Persentase	86,00	87,00	88,00	89,00	90,00

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang memperjelas bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam rangkaian kebijakan. Kebijakan adalah pedoman wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

5.2

Pengar

usutamaan dalam Pembangunan

Dalam penyusunan Renstra Perangkat daerah melakukan pengarusutamaan atau *mainstreaming* terhadap isu-isu strategis yaitu :

- a. Pengarusutamaan Gender (PUG) yang ditindaklanjuti dalam bentuk *Gender Analisis Pathway* (GAP), *Gender Budget Statement* (GBS) sebagai lampiran RKA. RKA merupakan dokumen operasional Renstra dan Renja.
- b. melakukan pengarusutamaan penanggulangan masalah gizi (stunting) baik yang bersifat spesifik gizi (penanggulangan langsung kepada kelompok sasaran penanggulangan masalah gizi/stunting yaitu remaja putri, pasangan usia subur, ibu hamil, ibu melahirkan/nifas, ibu menyusui, ibu yang memiliki baduta dan balita) maupun penanggulangan sensitif gizi (program pemberdayaan ekonomi, pendidikan, sosial hingga sanitasi dasar) yang ditindaklanjuti dengan rencana aksi 2 konvergensi stunting sebagai penjabaran renstra dan renja.
- c. pengarusutamaan inovasi dalam kebijakan, program, kegiatan atau aktivitas pembangunan yang dilaksanakan dengan inovasi yang memenuhi kelengkapan dan kematangan inovasi daerah.
- d. pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan dalam perencanaan program, kegiatan dan aktivitas perangkat daerah.

- e. pengarusutamaan keberpihakan kepada kelompok inklusi antara lain, difabel, lansia, masyarakat tertinggal, pemuda, perempuan dan anak serta kelompok inklusi lain dalam penyusunan program, kegiatan dan aktifitas perangkat daerah.
- f. Pengarusutamaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam kebijakan, rencana, program Perangkat Daerah.

5.3

Kebijakan

Rumusan strategi diperjelas dengan perumusan kebijakan, rumusan kebijakan diharapkan dapat menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih rasional dan memperjelas strategi sehingga lebih terfokus dan operasional. Penyusunan rancangan kebijakan dilakukan dengan memperhatikan keselarasannya dengan peraturan perUndang-undangan yang sudah ada.

Keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dalam lima tahun mendatang dapat dilihat pada tabel 5.1 berikut :

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1.	Meningkatkan infrastruktur wilayah yang mantap	<ol style="list-style-type: none">1. Meningkatnya infrastruktur sumber daya air yang mantap;2. Meningkatnya infrastruktur kebinamargaan yang mantap;3. Meningkatnya infrastruktur keciptakaryaannya yang mantap;4. Meningkatnya jumlah penyedia jasa konstruksi yang kompetitif;5. Meningkatnya kepatuhan terhadap kesesuaian pemanfaatan ruang untuk pembangunan;	Percepatan pemerataan infrastruktur dasar dan aksesibilitas wilayah yang berwawasan lingkungan	<p>Arah kebijakan Tahun 2021 :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Percepatan pemerataan infrastruktur wilayah2. Penataan ruang kota dan permukiman <p>Arah kebijakan Tahun 2022 :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Percepatan pemerataan infrastruktur wilayah2. Penataan ruang kota dan permukiman <p>Arah kebijakan Tahun 2023 :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Percepatan pemerataan infrastruktur wilayah2. Penataan ruang kota dan permukiman <p>Arah kebijakan Tahun 2024 :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Percepatan pemerataan infrastruktur wilayah

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
SERTA PENDANAAN

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dirumuskan untuk mencapai sasaran dan tujuan sesuai tugas dan fungsi OPD. Sedangkan kegiatan adalah bagian dari program yang memuat sekumpulan tindakan pengerahan semua sumber daya sebagai masukan (input), untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk sumber daya manusia, barang jasa atau modal. Program yang direncanakan pada dasarnya untuk melaksanakan program prioritas RPJMD Kabupaten Tegal tahun 2019-2024. Namun untuk keberhasilan pelaksanaan program prioritas, diperlukan program yang dapat mendukung dan menunjang kelancaran pelaksanaannya, selanjutnya program-program tersebut dijabarkan lebih lanjut ke dalam rencana kegiatan. Pemilihan kegiatan dan sub kegiatan untuk masing-masing program didasarkan pada strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal tahun 2019-2024, kemudian target kinerja program dan kerangka pendanaan, dinyatakan dalam Persentase dan dalam satuan rupiah.

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota

1.1 Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.1.1 Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan

Perangkat Daerah

1.1.2 Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- 1.2 Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
- 1.2.1 Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 1.2.2 Sub Kegiatan : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - 1.2.3 Sub Kegiatan : Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- 1.3 Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**
- 1.3.1 Sub Kegiatan : Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- 1.4 Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**
- 1.4.1 Sub Kegiatan : Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
 - 1.4.2 Sub Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - 1.4.3 Sub Kegiatan : Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - 1.4.4 Sub Kegiatan : Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai
 - 1.4.5 Sub Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - 1.4.6 Sub Kegiatan : Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
- 1.5 Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah**
- 1.5.1 Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 1.5.2 Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 1.5.3 Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- 1.6 Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

- 1.6.1 Sub Kegiatan : Pengadaan Mebel
- 1.6.2 Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya
- 1.7 Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
 - 1.7.1 Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 1.7.2 Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
- 1.8 Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
 - 1.8.1 Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 1.8.2 Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
 - 1.8.3 Sub Kegiatan : Pemeliharaan Mebel
 - 1.8.4 Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 1.8.5 Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

- 2.1 Kegiatan : Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**
 - 2.1.1 Sub Kegiatan : Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa
 - 2.1.2 Sub Kegiatan : Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan
 - 2.1.3 Sub Kegiatan : Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
 - 2.1.4 Sub Kegiatan : Operasi dan Pemeliharaan Jaringan



Irigasi

2.1.5 Sub Kegiatan : Operasional Unit Pengelolaan irigasi

2.1.6 Sub Kegiatan : Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air
Irigasi

3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase

3.1 Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota

3.1.1 Sub Kegiatan : Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan

3.1.2 Sub Kegiatan : Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan dan Lingkungan

3.1.3 Sub Kegiatan : Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan

3.1.4 Sub Kegiatan : Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan

4. Program Penyelenggaraan Jalan

4.1 Kegiatan : Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota

4.1.1 Sub Kegiatan : Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengembangan Jalan

4.1.2 Sub Kegiatan : Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan

4.1.3 Sub Kegiatan : Pembangunan Jalan

4.1.4 Sub Kegiatan : Pelebaran Jalan Menuju Standar

4.1.5 Sub Kegiatan : Pemeliharaan Berkala Jalan

4.1.6 Sub Kegiatan : Pemeliharaan Rutin Jalan

4.1.7 Sub Kegiatan : Pembangunan Jembatan

4.1.8 Sub Kegiatan : Rehabilitasi Jembatan

4.1.9 Sub Kegiatan : Pemeliharaan Rutin Jembatan

5. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

5.1 Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota

- 5.1.1 Sub Kegiatan : Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM
- 5.1.2 Sub Kegiatan : Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan
- 5.1.3 Sub Kegiatan : Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan

6. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional

6.1 Kegiatan : Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota

- 6.1.1 Sub Kegiatan : Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS

7. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah

7.1 Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota

- 7.1.1 Sub Kegiatan : Penyediaan Sarana Pengangkut Lumpur Tinja
- 7.1.2 Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja

8. Program Penataan Bangunan Gedung

8.1 Kegiatan : Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Layak Fungsi Bangunan Gedung

- 8.1.1 Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG

- 8.1.2 Sub Kegiatan : Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/ Kota
- 8.1.3 Sub Kegiatan : Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/ Kota
- 8.1.4 Sub Kegiatan : Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota
- 8.1.5 Sub Kegiatan : Penilikan terhadap Penyelenggaraan Bangunan Gedung oleh Pemilik Bangunan

9. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya

9.1 Kegiatan : Penyelenggaraan Penataan Gedung dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/ Kota

- 9.1.1 Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Rencana Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan
- 9.1.2 Sub Kegiatan : Penataan Bangunan dan Lingkungan

10. Program Pengembangan Jasa Konstruksi

10.1 Kegiatan : Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi

- 10.1.1 Sub Kegiatan : Penyiapan Instruktur/Asesor/ Penyelenggaraan Pelatihan
- 10.1.2 Sub Kegiatan : Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
- 10.1.3 Sub Kegiatan : Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi

10.2 Kegiatan : Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

- 10.2.1 Sub Kegiatan : Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi

- 10.2.2 Sub Kegiatan : Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi
- 10.2.3 Sub Kegiatan : Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha
- 10.2.4 Sub Kegiatan : Penyusunan Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi

10.3 Kegiatan : Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi

- 10.3.1 Sub Kegiatan : Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi
- 10.3 .2 Sub Kegiatan : Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi

11. Program Penyelenggaraan Tata Ruang

11.1 Kegiatan : Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/ Kota

- 11.1.1 Sub Kegiatan : Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/ Kota
- 11.1.2 Sub Kegiatan : Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/ Kota

11.2 Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota

- 11.2.1 Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota
- 11.2.2 Sub Kegiatan : Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang

**11.3 Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi
Pemanfaatan Ruang Daerah Kab/Kota**

11.3.1 Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi
Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota

**11.4 Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi
Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Daerah Kabupaten/Kota**

11.4.1 Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang


Secara rinci Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal tercantum pada tabel 6.1 berikut :

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal (Renstra Murni)

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja	Lokasi
									2020		2021		2022		2023		2024		Target	Rp. (000)		
									Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	Meningkatkan Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian, Perencanaan dan Keuangan																					
		Meningkatnya Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian, Perencanaan dan Keuangan	Persentase Layanan Kesekretariatan																			

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja	Lokasi	
									2020		2021		2022		2023		2024		Target	Rp. (000)			
									Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
					Prgm. Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian, Perencanaan dan Keuangan DPU	Persentase pelayanan Kesekretariatan	%	100%			5.490.000	6.039.000	6.195.200	6.923.207	7.637.932						32.285.339	DPU	Kab. Tegal
					Penyediaan Jasa Kantor	Persentase penyediaan jasa kantor	%		100%	980.000	100%	1.078.000	100%	1.185.800	100%	1.204.380	100%	1.434.820	100%	5.883.000			
						Jumlah Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang mendapatkan honorarium	orang		5		5		5		5		5		25				
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	bulan		12		12		12		12		12		60				
						Jumlah bulan terpenuhinya peralatan dan bahan	bulan		12		12		12		12		12		60				



kebersihan
kantor

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja	Lokasi	
									2020		2021		2022		2023		2024		Target	Rp. (000)			
									Targ et	Rp. (000)	Targ et	Rp. (000)	Targ et	Rp. (000)	Targ et	Rp. (000)	Targ et	Rp. (000)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
						Jumlah bulan terpenuhin ya peralatan dan bahan kebersihan kantor	bul an			12		12		12		12		12		60			
						Jumlah bulan terpenuhin ya komponen listrik dan elektronik	bul an			12		12		12		12		12		60			
						Jumlah paket alat tulis kantor yang tersedia	pak et			1		1		1		1		1		5			
						Jumlah bulan terpenuhin ya bahan cetakan dan pengganda an	bul an			12		12		12		12		12		60			
						Jumlah bulan terpenuhin ya peralatan rumah tangga	bul an			12		12		12		12		12		60			
						Jumlah bulan terpenuhin ya bahan bacaan dan publikasi	bul an			12		12		12		12		12		60			

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja	Lokasi	
									2020		2021		2022		2023		2024		Target	Rp. (000)			
									Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
					Pemeliharaan Sarana Prasarana Kantor	Persentase cakupan gedung, kendaraan, laboratorium dan peralatan dalam kondisi baik	%			100%	3.230.000	100%	3.553.000	100%	3.908.300	100%	4.099.130	100%	4.329.043	100%	19.119.473		
						Jumlah gedung kantor yang terpelihara	Gedung			7		7		7		7		7		35			
						Jumlah unit pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	unit			50		50		50		50		50		250			
						Jumlah UPTD yang melaksanakan pemeliharaan dan operasional laboratorium konstruksi	UPTD			1		1		1		1		1		5			
						Jumlah bulan terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung	bulan			12		12		12		12		12		60			



kantor

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja	Lokasi	
									2020		2021		2022		2023		2024		Target	Rp. (000)			
									Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
						Jumlah paket rehabilitasi gedung kantor	paket			2		2		2		2		2		10			
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Persentase tersedianya sarana dan prasarana kantor	%		100%	100.000	100%	110.000	100%	121.000	100%	131.100	100%	146.410		608.510			
						Jumlah paket pengadaan alat kantor, alat rumah tangga dan komputer	paket			1		1		1		1		1		5			
					Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase jumlah pegawai yang melaksanakan pendidikan, pelatihan, bimbingan teknis dan study banding	%		100%	110.000	100%	121.000	100%	133.100	100%	140.410	100%	161.050	100%	665.560			
						Jumlah Aparatur yang mengikuti pendidikan, pelatihan, bimbingan teknis dan study	aparatur			174		174		174		174		174		870			

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja	Lokasi
									2020		2021		2022		2023		2024		Target	Rp. (000)		
									Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
					Penatausahaan Keuangan dan Barang Milik Daerah	Persentase tersusunnya laporan penatausahaan keuangan dan BMD	%		100%	700.000	100%	770.000	100%	847.000	100%	875.700	100%	1.024.870	100%	4.217.570		
						Jumlah bulan tersusunnya laporan penatausahaan keuangan dan BMD	bulan		12		12		12		12		12		60			
					Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Persentase terpenuhinya pelaksanaan Rapat Koordinasi /konsultasi ke dalam/luar daerah serta penyediaan makanan dan minuman rapat PD	%		100%	370.000	100%	407.000	100%	447.700	100%	472.470	100%	541.720	100%	2.238.890		
						Jumlah bulan terpenuhinya makanan dan minuman harian dan rapat perangkat	bulan		12		12		12		12		12		60			

						daerah																
						terampil konstruksi																
No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja	Lokasi
									2020		2021		2022		2023		2024		Target	Rp. (000)		
									Targ et	Rp. (000)	Targ et	Rp. (000)	Targ et	Rp. (000)	Targ et	Rp. (000)	Targ et	Rp. (000)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	bulan		12		12		12		12		12		60			
					Pengadaan alat laboratorium	Persentase peningkatan jumlah alat laboratorium terkalibrasi	%		60%		70%	433.070	80%	517.566	80%	531.739	100%	628.800	100%	2.111.175		
						Jumlah alat laboratorium yang terkalibrasi	unit		6		6		6		6		6		30			
					Pemeliharaan sarana prasarana kebinamargaan	Persentase sarana dan prasarana kebinamargaan yang terpelihara	%		50,40%		62,80%	562.430	75,20%	618.676	87,60%	645.500	100%	748.525	100%	2.575.131		

						Jumlah alat berat dalam kondisi baik	unit		5		5		5		5		5		55					
						Program, Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian	%		100%	1.779.990	100%	2.507.990	100%	2.842.093	100%	3.001.252	100%	3.301.432	100%	13.432.757				
No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja	Lokasi		
									2020		2021		2022		2023		2024		Target	Rp. (000)				
									Targ et	Rp. (000)	Targ et	Rp. (000)	Targ et	Rp. (000)	Targ et	Rp. (000)	Targ et	Rp. (000)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
						Jumlah kegiatan penyusunan dokumen RKA-DPA	kali		2		2		2		2		2		10					
						Jumlah dokumen SPIP yang disusun	dokumen		1		1		1		1		1		5					
						Jumlah kegiatan penyelenggaraan Forum OPD	kali		1		1		1		1		1		5					
						Jumlah dokumen LKPI, LPPD dan LKjIP yang disusun	dokumen		3		3		3		3		3		15					
						Jumlah kegiatan penyelenggaraan Pameran Investasi	kali		1		1		1		1		1		5					

						Jumlah dokumen AHSP yang disusun	dokumen		4		4		4		4		4		20			
2	Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan prasarana jalan dan jembatan kabupaten									169.970.012		171.247.016		172.185.023		173.008.493		174.039.436		860.449.980		
									133.700.000		122.856.000		122.860.208		122.850.000		122.880.000		625.146.208			
No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja	Lokasi
									2020		2021		2022		2023		2024		Target	Rp. (000)		
									Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan kabupaten	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik																			
					Program Jalan	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%		70,02%	37.100.000	77,62%	33.150.000	85,22%	33.150.000	92,82%	33.150.000	100%	33.150.000	100%	169.700.000	DPU	Kab. Tegal
					Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan	Persentase perencanaan teknis pembangunan jalan	%		100%	200.000	100%	150.000	100%	150.000	100%	150.000	100%	150.000	100%	800.000		
						Jumlah dokumen DED pelebaran dan drainase jalan	dokumen		2		2		2		2		2		10			

					Peningkatan Jalan (DAK)	Persentase kondisi jalan baik	%	100%	19.900.000	100%	19.000.000	100%	19.000.000	100%	19.000.000	100%	19.000.000	100%	95.900.000		
						Jumlah pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan kabupaten yang dilaksanakan	paket	10		10		10		10		10		50			

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja	Lokasi
									2020		2021		2022		2023		2024		Target	Rp. (000)		
									Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
					Pemeliharaan Jalan	Persentase terpeliharanya jalan kabupaten dalam kondisi baik	%		100%	17.000.000	100%	14.000.000	100%	14.000.000	100%	14.000.000	100%	14.000.000	100%	73.000.000		
						Jml jalan kab.dalam kondisi baik	ruas jalan		454		454		454		454		454		2270			
			Persentase jalan yang memiliki drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5)																			
						Persentase jalan yang memiliki drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5)	%	14,30%	14,30%	96.600.000	14,30%	89.706.000	14,30%	89.710.208	14,30%	89.700.000	14,30%	89.730.000	14,30%	455.446.208	DPU	Kab. Tegal
					Peningkatan Jalan	Persentase peningkatan jalan dan bangunan pelengkap nya	%		100%	96.600.000	100%	89.706.000	100%	89.710.208	100%	89.700.000	100%	89.730.000	100%			
						Jumlah peningkatan jalan, pembangunan talud dan	paket		402		402		402		402		402		2010			

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja	Lokasi
									2020		2021		2022		2023		2024		Target	Rp. (000)		
									Targ et	Rp. (000)	Targ et	Rp. (000)	Targ et	Rp. (000)	Targ et	Rp. (000)	Targ et	Rp. (000)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		Meningkatnya kualitas infrastruktur jembatan kabupaten	Persentase jembatan kabupaten dalam kondisi baik																			
					Program Jembatan	Proporsi Jembatan dalam Kondisi Baik	%	67,11%	73,51%	10.900.011	79,91%	20.000.013	86,31%	20.300.015	92,71%	20.300.017	100%	20.284.019	100%	91.784.075	DPU	Kab. Tegal
					Perencanaan Pembangunan Jembatan	Persentase Perencanaan Pembangunan Jembatan	%		100%	150.000	100%	200.000	100%	200.000	100%	200.000	100%	200.000	100%	950.000		
						Jumlah dokumen DED jembatan dan data jembatan	dokumen		3		3		3		3		3		15			
						Jumlah jembatan baru	unit		17		17		17		17		17		85			
					Rehabilitasi Jembatan	Persentase jembatan yang direhabilitasi	%		100%	3.550.000	100%	6.300.000	100%	6.300.000	100%	6.300.000	100%	6.284.000	100%	28.734.000		
						Jumlah jembatan dalam kondisi baik	unit		12		12		12		12		12		60			

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja	Lokasi
									2020		2021		2022		2023		2024		Target	Rp. (000)		
									Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
					Pemeliharaan Jembatan (Swakelola)	Persentase terpeliharanya jembatan kabupaten dalam kondisi baik	%		100%	3.550.000	100%	6.000.000	100%	6.300.000	100%	6.300.000	100%	6.300.000	100%	28.450.000		
						Jumlah jembatan kabupaten yang terpelihara dalam kondisi baik	ruas		454		454		454		454		454		2270			
		Meningkatnya pelayanan dan ketersediaan jaringan irigasi	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik																			
					Program Sumber Daya Air	Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi baik	%	67,11%	66,40%	18.100.011	74,80%	17.800.013	83,20%	17.750.015	91,60%	17.750.017	100%	17.525.019	100%	88.925.075	DPU	Kab. Tegal
					Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi	Persentase Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi	%		100%	900.000	100%	900.000	100%	900.000	100%	900.000	100%	900.000	100%	4.500.000		

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja	Lokasi
									2020		2021		2022		2023		2024		Target	Rp. (000)		
									Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						Jumlah dokumen perencanaan pembangunan jaringan irigasi	dokumen		7		7		7		7		7		35			
					Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Persentase jaringan irigasi yang terpelihara	%		100%	4.000.000	100%	3.800.000	100%	3.800.000	100%	3.800.000	100%	3.800.000	100%	19.200.000		
						Jumlah jaringan irigasi yang terpelihara	DI		12		12		12		12		12		60			
					Rehabilitasi/ Pemeliharaan Pintu Air	Persentase pintu air yang terpelihara	%		100%	800.000	100%	750.000	100%	750.000	100%	750.000	100%	750.000	100%	3.800.000		
						Jumlah pintu air pada jaringan irigasi yang terpelihara	paket		2		2		2		2		2		10			
					Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi Yang Telah dibangun	Fungsi Jaringan Irigasi yang optimal	%		100%	2.000.000	100%	1.950.000	100%	1.950.000	100%	1.950.000	100%	1.980.000	100%	9.830.000		

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja	Lokasi	
									2020		2021		2022		2023		2024		Target	Rp. (000)			
									Targ et	Rp. (000)	Targ et	Rp. (000)	Targ et	Rp. (000)	Targ et	Rp. (000)	Targ et	Rp. (000)					
									1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			13
					Pemberdayaan Petani Pemakai Air	Persentase pemberdayaan petani pemakai air	%		1	100%	300.000	100%	300.000	100%	300.000	100%	300.000	100%	300.000	100%	1.500.000		
						Terlaksananya pemberdayaan petani pemakai air	dokumen		1			1			1			1		5			
					Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Irigasi	Persentase jaringan irigasi pada DI kewenangan kabupaten yang terpelihara	%			50%	1.600.000	50%	1.600.000	50%	1.600.000	50%	1.600.000	50%	1.600.000	100%	8.000.000		
						Jumlah jaringan irigasi yang terpelihara	DI		114			114			114			114		570			
					Operasional Penjaga Pintu Air	Persentase terlaksananya operasional penjaga pintu air	%			100%	3.000.000	100%	3.000.000	100%	3.000.000	100%	3.000.000	100%	2.900.000	100%	14.900.000		

						Jumlah honor tenaga operasional penjaga pintu air	orang		121		121		121		121		605					
					Pembangunan / Peningkatan Jaringan Irigasi	Persentase jaringan irigasi yang terbangun	%		100%	3.000.000	100%	3.000.000	100%	3.000.000	100%	3.000.000	100%	2.800.000	100%	14.800.000		
No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja	Lokasi
									2020		2021		2022		2023		2024		Target	Rp. (000)		
									Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						Jumlah jaringan irigasi yang terbangun	DI		12		12		12		12		12		60			
					Rehabilitasi Jaringan Irigasi (DAK)	Persentase Jaringan Irigasi baik	%		100%	2.500.000	100%	2.500.000	100%	2.450.000	100%	2.450.000	100%	2.495.000	100%	12.395.000		

Tabel 6.2

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal (Renstra Terbatas)

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja	Lokasi
									2020		2021		2022		2023		2024		Target	Rp. (000)		
									Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan prasarana jalan dan jembatan kabupaten									169.969.990		171.246.990		172.184.993		173.008.442		174.039.345		860.449.760		
		Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan kabupaten	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik							133.700.000		122.856.000		122.860.208		122.850.000		122.845.005		625.111.213		
					Program Jalan	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%		70,02%	37.100.000	77,62%	33.150.000	85,22%	33.150.000	92,82%	33.150.000	100%	33.145.000	100%	169.695.000	DPU	Kab. Tegal
					Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan	Persentase perencanaan teknis pembangunan jalan	%		100%	200.000	100%	150.000	100%	150.000	100%	150.000	100%	145.000	100%	795.000		
						Jumlah dokumen DED pelebaran dan	dokumen		2		2		2		2		2		10			

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja	Lokasi
									2020		2021		2022		2023		2024		Target	Rp. (000)		
									Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
					Peningkatan Jalan (DAK)	Persentase kondisi jalan baik	%		100%	19.900.000	100%	19.000.000	100%	19.000.000	100%	19.000.000	100%	19.000.000	100%	95.900.000		
						Jumlah pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan kabupaten yang dilaksanakan	paket		10		10		10		10		10		50			
					Pemeliharaan Jalan	Persentase terpeliharanya jalan kabupaten dalam kondisi baik	%		100%	17.000.000	100%	14.000.000	100%	14.000.000	100%	14.000.000	100%	14.000.000	100%	73.000.000		
						Jumlah jalan kabupaten dalam kondisi baik	ruas jalan		454		454		454		454		454		2270			
			Persentase jalan yang memiliki drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5)																			
						Persentase jalan yang memiliki drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5)	%	14,30%	14,30%	96.600.000	14,30%	89.706.000	14,30%	89.710.208	14,30%	89.700.000	14,30%	89.700.005	14,30%	455.416.213	DPU	Kab. Tegal

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja	Lokasi
									2020		2021		2022		2023		2024		Target	Rp. (000)		
									Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						Jumlah peningkatan jalan, pembangunan talud dan drainase jalan	paket		100%	96.600.000	100%	89.706.000	100%	89.710.208	100%	89.700.000	100%	89.700.005	100%	455.416.213		
		Meningkatnya kualitas infrastruktur jembatan kabupaten	Persentase jembatan kabupaten dalam kondisi baik																			
					Program Jembatan	Proporsi Jembatan dalam Kondisi Baik	%	67,11%	73,51%	10.900.000	79,91%	20.300.000	86,31%	20.300.000	92,71%	20.300.000	100%	20.279.588	100%	92.079.588	DPU	Kab. Tegal
					Perencanaan Pembangunan Jembatan	Persentase Perencanaan Pembangunan Jembatan	%		100%	150.000	100%	200.000	100%	200.000	100%	200.000	100%	200.000	100%	950.000		
						Jumlah dokumen DED jembatan dan data jembatan	dokumen		3		3		3		3		3		16,5			
					Pembangunan Jembatan	Persentase pembangunan jembatan	%		100%	3.650.000	100%	7.500.000	100%	7.500.000	100%	7.500.000	100%	7.495.000	100%	33.645.000		
						Jumlah jembatan baru	unit		17		17		17		17		17		85			
					Rehabilitasi Jembatan	Persentase jembatan yang direhabilitasi	%		100%	3.550.000	100%	6.300.000	100%	6.300.000	100%	6.300.000	100%	6.284.588	100%	28.734.588		

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja	Lokasi
									2020		2021		2022		2023		2024		Target	Rp. (000)		
									Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						Jumlah jembatan dalam kondisi baik	unit		12		12		12		12		12		60			
						Jumlah jembatan kabupaten yang terpelihara dalam kondisi baik	ruas		454		454		454		454		454		2270			
2	Meningkatkan pengelolaan dan penyediaan jaringan irigasi dalam kondisi baik	Meningkatkannya pelayanan dan ketersediaan jaringan irigasi	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik																			
					Prgm. SDA	Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi baik	%	67,11%	66,40%	18.100.000	74,80%	17.500.000	83,20%	17.750.000	91,60%	17.740.346	100%	17.145.000	100%	88.235.346	DPU	Kab. Tegal



					Perencana an Pembangu nan Jaringan Irigasi	Persentase Perencana an Pembangu nan Jaringan Irigasi	%		100%	900.000	100%	900.000	100%	900.000	100%	900.000	100%	900.000	100%	4.500.000		
--	--	--	--	--	-----------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------	---	--	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------	------	-----------	--	--



No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja	Lokasi
									2020		2021		2022		2023		2024		Target	Rp. (000)		
									Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						Jumlah dokumen perencanaan pembangunan jaringan irigasi	dokumen		7		7		7		7		7		35			
					Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Persentase jaringan irigasi yang terpelihara	%		100%	4.000.000	100%	3.800.000	100%	3.800.000	100%	3.800.000	100%	3.800.000	100%	19.200.000		
						Jumlah jaringan irigasi yang terpelihara	DI		12		12		12		12		12		60			
					Rehabilitasi/ Pemeliharaan Pintu Air	Persentase pintu air yang terpelihara	%		100%	800.000	100%	750.000	100%	750.000	100%	750.000	100%	750.000	100%	3.800.000		
						Jumlah pintu air pada jaringan irigasi yang terpelihara	paket		2		2		2		2		2		10			
					Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi Yang Telah dibangun	Fungsi Jaringan Irigasi yang optimal	%		100%	2.000.000	100%	1.950.000	100%	1.950.000	100%	1.940.346	100%	1.850.000	100%	9.690.346		
						Jumlah jaringan irigasi yang berfungsi secara optimal	paket		1		1		1		1		1		5			





No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja	Lokasi
									2020		2021		2022		2023		2024		Target	Rp. (000)		
									Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						Terlaksananya pemberdayaan petani pemakai air	dokumen		1		1		1		1		1		5			
					Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Irigasi	Persentase jaringan irigasi pada DI kewenangan kabupaten yang terpelihara	%		50%	1.600.000	50%	1.600.000	50%	1.600.000	50%	1.600.000	50%	1.450.000	100%	7.850.000		
						Jumlah jaringan irigasi yang terpelihara	DI		114		114		114		114		114		570			
					Operasional Penjaga Pintu Air	Persentase terlaksananya operasional penjaga pintu air	%		100%	3.000.000	100%	3.000.000	100%	3.000.000	100%	3.000.000	100%	2.800.000	100%	14.800.000		
						Jumlah honor tenaga operasional penjaga pintu air	orang		121		121		121		121		121		605			
					Pembangunan / Peningkatan Jaringan Irigasi	Persentase jaringan irigasi yang terbangun	%		100%	3.000.000	100%	3.000.000	100%	3.000.000	100%	3.000.000	100%	2.900.000	100%	14.900.000		
						Jumlah jaringan irigasi yang terbangun	DI		12		12		12		12		12		60			





					Rehabilitasi Jaringan Irigasi (DAK)	Persentase Jaringan Irigasi baik	%		100%	2.500.000	100%	2.200.000	100%	2.450.000	100%	2.450.000	100%	2.495.000	100%	12.095.000		
--	--	--	--	--	-------------------------------------	----------------------------------	---	--	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	------------	--	--

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja	Lokasi
									2020		2021		2022		2023		2024		Target	Rp. (000)		
									Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						Jumlah pembangunan, pemeliharaan dan pelayanan SDA kewenangan kabupaten yang dilaksanakan	paket			4		4		4		4		4		20		
3	Meningkatkan Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian, Perencanaan dan Keuangan	Meningkatnya Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian, Perencanaan dan Keuangan	Persentase Layanan Kesekretariatan		Prgm. Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian, Perencanaan dan Keuangan DPU	Persentase Layanan Kesekretariatan	%	100%		7.269.990		10.590.990		11.274.785		12.118.096		13.769.752		55.023.613	DPU	Kab. Tegal
					Penyediaan Jasa Kantor	Persentase penyedia jasa kantor	%		100%	980.000	100%	1.078.000	100%	1.085.800	100%	1.204.380	100%	1.434.820	100%	5.783.000		
						Jumlah Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang mendapatkan honorarium	orang		5		5		5		5		5		25			
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa komunikasi, sumber	bulan		12		12		12		12		12		60			

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja	Lokasi
									2020		2021		2022		2023		2024		Target	Rp. (000)		
									Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						Jumlah bulan terpenuhinya peralatan dan bahan kebersihan kantor	bulan		12		12		12		12		12		60			
						Jumlah bulan terpenuhinya komponen listrik dan elektronik	bulan		12		12		12		12		12		60			
						Jumlah paket alat tulis kantor yang tersedia	paket		1		1		1		1		1		5			
						Jumlah bulan terpenuhinya bahan cetakan dan penggandaan	bulan		12		12		12		12		12		60			
						Jumlah bulan terpenuhinya peralatan rumah tangga	bulan		12		12		12		12		12		60			
						Jumlah bulan terpenuhinya bahan bacaan dan publikasi	bulan		12		12		12		12		12		60			

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja	Lokasi
									2020										Target	Rp. (000)		
									Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
					Pemeliharaan Sarana Prasarana Kantor	Persentase cakupan gedung, kendaraan, laboratorium dan peralatan dalam kondisi baik	%		100%	3.230.000	100%	3.553.000	100%	3.608.300	100%	4.049.130	100%	4.729.043	100%	19.169.473		
						Jumlah gedung kantor yang terpelihara	Gedung		7		7		7		7		7		35			
						Jumlah unit pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	unit		50		50		50		50		50		250			
						Jumlah UPTD yang melaksanakan pemeliharaan dan operasional laboratorium konstruksi	UPTD		1		1		1		1		1		5			
						Jumlah bulan terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor	bulan		12		12		12		12		12		60			
						Jumlah paket rehabilitasi gedung	paket		2		2		2		2		2		10			



kantor

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja	Lokasi
									2020		2021		2022		2023		2024		Target	Rp. (000)		
									Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Persentase tersedianya sarana dan prasarana kantor	%		100%	100.000	100%	110.000	100%	121.000	100%	131.100	100%	146.410		608.510		
					Jumlah paket pengadaan alat kantor, alat rumah tangga dan komputer		paket		1		1		1		1		1		5			
					Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase jumlah pegawai yang melaksanakan pendidikan, pelatihan, bimbingan teknis dan study banding	%		100%	110.000	100%	121.000	100%	133.100	100%	140.410	100%	161.050	100%	665.560		
					Jumlah Aparatur yang mengikuti pendidikan, pelatihan, bimbingan teknis dan study banding		aparatur		174		174		174		174		174		870			
					Penatausahaan Keuangan dan Barang Milik Daerah	Persentase tersusunnya laporan penatausahaan keuangan dan BMD	%		100%	700.000	100%	770.000	100%	847.000	100%	900.700	100%	1.024.870	100%	4.242.570		



No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja	Lokasi
									2020		2021		2022		2023		2024		Target	Rp. (000)		
									Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						Jumlah bulan tersusunnya laporan penatausahaan keuangan dan BMD	bulan		12		12		12		12		12		60			
					Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Persentase terpenuhinya pelaksanaan Rapat koordinasi /konsultasi ke dalam/luar daerah serta penyediaan makanan dan minuman rapat PD	%		100%	370.000	100%	407.000	100%	447.700	100%	442.572	100%	541.720	100%	2.208.992		
						Jumlah bulan terpenuhinya makanan dan minuman harian dan rapat perangkat daerah	bulan		12		12		12		12		12		60			
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	bulan		12		12		12		12		12		60			



No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja	Lokasi
									2020		2021		2022		2023		2024		Target	Rp. (000)		
									Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
					Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Jasa Konstruksi	Persentase pembinaan dan pengawasan penyedia jasa konstruksi memenuhi standar kualifikasi	%		100%	-	22%	900.000	38.50%	950.000	47%	850.000	57.50%	870.000	57.50%	3.570.000	DPU	Kab. Tegal
					Penyiapan <i>Training Need Assessment</i> (TNA) pelatihan tenaga terampil konstruksi		kali		0		2		2		2		2		8			
					Penyiapan SOP penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi		dokumen		0		1		1		1		1		4			
					Jumlah tenaga instruktur/asesor/penyelenggara pelatihan		orang		0		1		1		1		0		3			
					Jumlah pelatihan tenaga terampil konstruksi yang terselenggara		kali		0		1		1		1		1		4			

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja	Lokasi
									2020		2021		2022		2023		2024		Target	Rp. (000)		
									Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	kali		0		1		1		1		1		4			
						Jumlah tenaga terampil yang bersertifikat	orang		75		75		50		50		25		275			
						Pengelolaan operasional layanan informasi jasa konstruksi	kali		0		12		12		12		12		48			
						Penyusunan data dan informasi profil pekerjaan konstruksi	dokumen		0		2		2		2		2		8			
						Pembinaan dan peningkatan kapasitas badan usaha jasa konstruksi	Perusahaan /CV		240		240		240		240		240		1200			
						Pemantauan dan Evaluasi IUJK Nasional yang telah diterbitkan	kali		0		12		12		12		12		48			

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja	Lokasi
									2020		2021		2022		2023		2024		Target	Rp. (000)		
									Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						Penyusunan Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Buku		0		1		0		0		0		1			
						Pengawasan dan evaluasi tata tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi	dokumen		0		1		1		1		1		4			
					Pelayanan Laboratorium, Konstruksi dan Sarana Prasarana	Persentase ketercapaian pelayanan laboratorium, konstruksi dan sarana prasarana	%		100%	-	100%	1.144.000	100%	1.279.792	100%	1.344.552	100%	1.560.407	100%	5.382.751		
						Jumlah pemohon uji laboratorium konstruksi	paket		0		100		100		100		100		500			
						Jumlah alat laboratorium yang terkalibrasi	unit		0		6		6		6		6		24			
						Jumlah alat berat	unit		0		5		5		5		5		50			

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja	Lokasi
									2020		2021		2022		2023		2024		Target	Rp. (000)		
									Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
					Program, Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian	Persentase ketercapaian perencanaan, pengendalian dan pelaporan evaluasi kinerja perangkat daerah	%		100%	1.779.990	100%	2.507.990	100%	2.802.093	100%	3.001.252	100%	3.301.432	100%	13.392.757		
						Jumlah dokumen Renja yang disusun	dokumen		1		1		1		1		1		5			
						Jumlah kegiatan penyusunan dokumen RKA-DPA	kali		2		2		2		2		2		10			
						Jumlah dokumen SPIP yang disusun	dokumen		1		1		1		1		1		5			
						Jumlah kegiatan penyelenggaraan Forum OPD	kali		1		1		1		1		1		5			
						Jumlah dokumen LKPJ, LPPD dan LKJIP yang disusun	dokumen		3		3		3		3		3		15			
						Jumlah kegiatan penyelenggaraan Pameran Investasi	kali		1		1		1		1		1		5			

						Jumlah dokumen AHSP yang disusun	dokumen		4		4		4		4		4		20			
No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja	Lokasi
									2020		2021		2022		2023		2024		Target	Rp. (000)		
									Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi yang disusun	dokumen		1		1		1		1		1		5			

Tabel 6.3

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal (Perubahan Renstra)

NO	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	KODE REKENING/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN				INDIKATOR TUJUAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN	Catatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2020	2021		2022		2023		2024		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra PD (2024)		Unit Kerja PD	Lokasi
			Target	Rp x(1000)	Target	Rp x(1000)				Target	Rp x(1000)	Target	Rp x(1000)	Target	Rp x(1000)	Target	Rp x(1000)				
	Meningkatkan Infrastruktur yang Mantap							72,88	74,88	215.966.556	78,80	231.808.701	81,66	216.519.732	83,59	220.891.372	83,59	885.186.361	DPU		
1		Meningkatnya Infrastruktur Sumber Daya Air yang Mantap				Persentase Infrastruktur Sumber Daya Air yang Mantap															
			1.03.02	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)			Rasio Ketersediaan Jaringan Irigasi pada Daerah Irigasi (DI) Kewenangan Kabupaten		58,86	60,10	7.931.125	61,33	6.000.000	62,57	6.060.000	63,80	6.241.800	63,80	26.232.925	DPU	Bidang Sumber Daya Air

NO	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	KODE REKENING/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR SASARAN PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN	Catatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanan	2021		2022		2023		2024		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra PD (2024)		Unit Kerja PD	Lokasi
				1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
				1.03.02.2.02.01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa			100		100		100		100		100			Kasi Perencanaan Teknis SDA
					DED Perencanaan Pembangunan Saluran Irigasi			5		5		5		5		25			
				1.03.02.2.02.02	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan			100		100		100		100		100			Kasi Pembangunan dan Peningkatan SDA
					Jumlah jaringan irigasi permukaan yang terpelihara			-		-		-		10		20			
				1.03.02.2.02.02	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan			100		100		100		100		100			Kasi Pembangunan dan Peningkatan SDA
					Jumlah DI yang dibangun/Rehabilitasi			-		-		21		21		63			
					Panjang Saluran DI yang dibangun/Rehabilitasi			-		-		3,4		3,4		10,2			
					Luas DI yang dibangun/Rehabilitasi			-		-		1.750		1.750		5.250			
				1.03.02.2.02.21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan			100		100		100		100		100			Kasi Operasi dan Pemeliharaan SDA
					Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi UPTD PU Wilayah III			-		-		7.062		7.062		21.186			

NO	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	KODE REKENING/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN				INDIKATOR SASARAN PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN	Catatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanan	2021		2022		2023		2024		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra PD (2024)		Unit Kerja PD	Lokasi
							Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi UPTD PU Wilayah V			-		-		8.720		8.720		26.160			
							Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi UPTD PU Wilayah VI			-		-		8885		8885		26.655			
							Jumlah DI yang Terpelihara			-		-		104		104		312			
							Panjang DI yang Terpelihara			-		-		108,2		108,2		324,6			
							Honor PHL Bidang Sumber Daya Air			-		-		112		112		336			
					1.03.02.2.02.27	Operasional Unit Pengelola Irigasi	Persentase terlaksananya operasional penjaga pintu air			0		0		0		100		100			Kasi Perencanaan Teknis SDA
							Luas DI yang dioperasikan			-		-		-		1949		5.874			
							Jumlah DI yang beroperasi			-		-		-		48		144			
					1.03.02.2.02.28	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	Persentase pemberdayaan petani pemakai air			100		100		100		100		100			Kasi Operasi dan Pemeliharaan SDA
							Pemberdayaan Petani Pemakai Air			1		1		1		1		5			
							Monitoring dan Evaluasi Alokasi Air			-		-		2		2		6			
							Pengadaan Bahan Banjiran dan Perlengkapan Kerja Lapangan			-		-		2		2		6			
							Pengadaan Pelumasan dan Pengecatan Pintu			-		-		1		1		3			
							Penyusunan RTT & Pola Tanam			-		-		2		2		6			
							Perbaikan Bangunan Ukur dan Pintu Air			-		-		5		5		15			
							Fasilitasi Komisi Irigasi Kabupaten			-		-		2		2		6			

NO	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	KODE REKENING/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN				INDIKATOR TUJUAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN	Catatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	2021		2022		2023		2024		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra PD (2024)		Unit Kerja PD	Lokasi
									-		-		1		1		3				
2		Meningkatnya Infrastruktur Kebinamargaan Yang Mantap																			
			1.03.06	Program Pengelolaan dan Pengembangan sistem Drainase					61,42	23.990.000	61,79	11.050.000	62,15	11.160.500	62,52	11.495.315	62,52	57.695.815	DPU	Kasi Pembangunan Jalan	
				1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang terhubung langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota																
					1.03.06.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan			0		0		100		100		100				
						DED perencanaan pembangunan saluran drainase			-		-		13		13		26				
					1.03.06.2.01.05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan dan Lingkungan			0		61,57		61,57		61,57		61,57			Kasi Pembangunan Jalan	
						Pembangunan saluran drainase			-		17 lokasi		17 lokasi		17 lokasi		51 lokasi				
						Panjang saluran drainase yang terbangun			-		(1,8 Km)		(1,8 Km)		(1,8 Km)		(5,4 Km)				
					1.03.06.2.01.06	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan															
						Peningkatan saluran drainase			-		-		1,5		1,5		3				
					1.03.06.2.01.07	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan															
						Pemeliharaan saluran drainase			-		-		3		3		6				

NO	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	KODE REKONING/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR SASARAN PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN	Catatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanan	2021		2022		2023		2024		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra PD (2024)		Unit Kerja PD	Lokasi
			1.03.10	Program Penyelenggaraan Jalan	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap			82,50	108.912.435	84,00	84.000.000	85,50	84.840.000	87,50	109.000.000	87,50	386.752.435	DPU	Kepala Bidang Jalan dan Jembatan
					Proporsi jembatan dalam kondisi mantap			89,50		91,00		92,00		93,50		93,50			
			1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota															
				1.03.10.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengembangan Jalan	Persentase perencanaan teknis pembangunan jalan		100		100		100		100		100			Kasi Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan
						Penyusunan perencanaan teknis peningkatan jalan		-		8		8		8		24			
				1.03.10.2.01.02	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Persentase Lahan/Tanah yang dibebaskan untuk penyelenggaraan jalan		0		0		0		0		0			
						Lahan/tanah yang dibebaskan													
				1.03.10.2.01.05	Pembangunan Jalan	Persentase kondisi jalan baik		0		100		100		100		100			Kasi Pembangunan Jalan dan Jembatan
						Pembangunan/peningkatan jalan kabupaten		-		3,55		3,55		3,55		10,65			
				1.03.10.2.01.06	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Persentase lebar jalan menuju standar		0		36,80		36,80		36,80		36,80			Kasi Pembangunan Jalan dan Jembatan
						Panjang jalan yang dilebarkan		-		0,3		0,3		0,3		0,9			
				1.03.10.2.01.10	Pemeliharaan Berkala Jalan	Persentase terpeliharanya jalan kabupaten dalam kondisi baik		0		0		0		0		0			
						Pemeliharaan berkala jalan		-		-		-		-		-			
				1.03.10.2.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Persentase terpeliharanya jalan kabupaten dalam kondisi baik		0		82,50		82,50		82,50		82,50			Kasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
						Pemeliharaan rutin jalan		-		6,99		6,99		6,99		2,097			

NO	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	KODE REKONING/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN			INDIKATOR SASARAN PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN	Catatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	2021		2022		2023		2024		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra PD (2024)		Unit Kerja PD	Lokasi
					1.03.10.2.01.1.2	Pembangunan Jembatan	Persentase pembangunan jembatan		0		0,03		0,03		0,03		0,03			Kasi Pembangunan Jalan dan Jembatan
							Pembangunan jembatan baru (panjang)		-		35		35		35		105			
							Pembangunan jembatan baru (jumlah)		-		3		3		3		9			
					1.03.10.2.01.1.8	Rehabilitasi Jembatan	Persentase jembatan yang direhabilitasi		0		0,03		0,03		0,03		0,03			Kasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
							Rehabilitasi jembatan (panjang)		-		11,9		11,9		11,9		35,7			
							Rehabilitasi jembatan (jumlah)		-		4		4		4		12			
					1.03.10.2.01.1.9	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Persentase terpeliharanya jembatan kabupaten dalam kondisi baik		0		0,26		0,26		0,26		0,26			Kasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
							Pemeliharaan jembatan (panjang)		-		120		120		120		360			
							Pemeliharaan jembatan (jumlah)		-		24		24		24		72			
							Honor PHL Bidang Jembatan		-		18		18		18		54			
							Pengadaan material darurat jembatan		-		1		1		1		3			
3		Meningkatnya Infrastruktur Keciptakaryaan yang Mantap					Persentase Infrastruktur Keciptakaryaan yang Mantap													
			1.03.03	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum			Cakupan Akses Layanan Air Minum		61,09	63,32	3.385.000	65,55	6.611.202	67,77	6.677.314	70,00	6.877.633	70,00	23.551.149	DPU
				1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/ Kota			Cakupan Akses Layanan Air minum di Kabupaten/ Kota												
				1.03.03.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan teknis SPAM			Jumlah koordinasi pelaksanaan air minum		-		1		1		1		4		
							DED Perencanaan Air Minum													
							Koordinasi													

NO	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	KODE REKUNING/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR SASARAN PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN	Catatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencan	2021		2022		2023		2024		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra PD (2024)		Unit Kerja PD	Lokasi
				1.03.03.2.01.05	Peningkatan SPAM di Kawasan Perkotaan			650		850		-		-		1.500	-		
				1.03.03.2.01.06	Peningkatan SPAM di Kawasan Perdesaan			1.100		1.200		1.300		1.400		5.000	-		
			1.03.04	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional				80,00	4.000.000	82,00	14.166.000	83,00	14.307.660	85,00	17.376.000	85,00	49.849.660	DPU	
				1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/ Kota														
				1.03.04.2.05	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS			-	-	10	8.000.000	-	-	-	-	10	8.000.000		
				1.03.04.2.05	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS			-	-	1	300.000	-	-	-	-	1	300.000		
			1.03.05	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah				95,17	6.825.000	95,57	2.749.320	95,97	2.776.813	96,37	6.930.000	96,37	19.281.133	DPU	
				1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota														
				1.03.05.2.01.13	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja					2	500.000			2	500.000		1.000.000		

NO	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	KODE REKENING/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN			INDIKATOR SASARAN PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN	Catatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanan	2021		2022		2023		2024		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra PD (2024)		Unit Kerja PD	Lokasi
					1.03.05.2.01.14	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja					1	274.335	1	300.000	1	300.000		874.335		
						Operasional Penyedotan Tinja														
						Operasional Penyedotan Tinja Gaji PHL														
						BBM														
			1.03.08	Program Penataan Bangunan Gedung			Rasio Bangunan Negara yang Sesuai Standar Teknis		78,00	32.192.372	79,12	43.026.555	80,24	43.456.821	81,36	35.640.000	81,36	154.315.748	DPU	
						Rasio Bangunan yang Memiliki IMB		7,49	-	8,01	-	8,57	-	9,15	-	9,15				
				1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di wilayah Daerah Kabupaten/ Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Layak Fungsi Bangunan Gedung		Rasio Bangunan Negara yang Sesuai Standar Teknis													
						Rasio Bangunan yang Memiliki IMB														
					1.03.08.2.01.01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Layak Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Rasio bangunan yang memiliki IMB		7,49		8,01		8,57		9,15		9,15			
					1.03.08.2.01.02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah rencana bangunan gedung negara yang sesuai standar teknis		3,00		4,00		3,00		2,00		2,00			
							Jumlah bangunan gedung negara yang terbangun sesuai rencana		3,00		4,00		5,00		3,00		32,00			
					1.03.08.2.01.03	Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/	Jumlah Regulasi terkait Bangunan Gedung yang tersusun		-	-	2,00		2,00		2,00		2,00			

NO	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	KODE REKONING/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN			INDIKATOR TUJUAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN	Catatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	2021		2022		2023		2024		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra PD (2024)		Unit Kerja PD	Lokasi
						Kota														
								0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0				
				1.03.08.2.01.04	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kab/ Kota	Terlaksananya Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara		1,00		1,00		1,00				5,00				
								-	-	-	-	-	-	-	-	-				
				1.03.08.2.01.09	Penilikan terhadap Penyelenggaraan Bangunan Gedung oleh Pemilik Bangunan	Jumlah bangunan gedung yang dilakukan penilikan bangunan		1,00		1,00		1,00				100				
								-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			1.03.09	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya		Rasio Bangunan dan Lingkungan yang Tertata		10,00	10.500.000	60,00	45.900.000	91,11	28.900.000	100,00	8.000.000	100,00	93.300.000	DPU		
				1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/ Kota															
				1.03.09.2.01	Penyusunan Dokumen Rencana Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan			75,00		82,50		100,00		100,00		100,00				
						Masterplan Penataan Kota Slawi		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00				
						DED Penataan Kota Slawi		50,00		65,00		100,00		100,00		100,00				
				1.03.09.2.01.03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Tersusunnya Rencana Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan		10,00		60,00		91,11		100,00		100,00				
						Pelaksanaan Penataan Kota Slawi		2,22		13,33		20,25		22,22		22,22				
						Penataan Kota Slawi Koridor 1		15,56		82,22		100,00		100,00		100,00				
						Penataan Kota Slawi Koridor 2		4,44		37,78		82,22		100,00		100,00				
4		Meningkatnya Jumlah Penyedia Jasa Konstruksi yang Kompetitif				Persentase Jumlah Penyedia Jasa Konstruksi yang Kompetitif														

NO	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	KODE REKENING/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR SASARAN PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN	Catatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencan	2021		2022		2023		2024		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra PD (2024)		Unit Kerja PD	Lokasi
			1.03.11	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rasio Tenaga Konstruksi yang Terlatih			60,00	950.000	80,00	1.000.000	80,00	1.010.000	80,00	2.000.000	80,00	4.960.000	DPU	Kepala Bidang Jasa Konstruksi
			1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase pelatihan tenaga terampil konstruksi yang terselenggara														
			1.03.11.2.01.02	Penyiapan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan	Persentase pengadaan instruktur/ asesor penyelenggaraan pelatihan			0		100		100		100		100			
					Monitoring dan evaluasi pelatihan jasa konstruksi yang tersedia			-		2		2		2		6			
			1.03.11.2.01.04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase peserta pelatihan tenaga konstruksi di Kabupaten Tegal			0		100		100		100		100			
					Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi			-		100		100		100		300			
					Bimbingan Teknis, Sosialisasi Penyelenggaraan Jasa Konstruksi			-		4		4		4		12			
			1.03.11.2.01.08	Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi			0		100		100		100		100			
					Monitoring pelatihan jasa konstruksi			-		2		2		2		6			
			1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan informasi jasa konstruksi yang tersedia			0		100		100		100		100			
			1.03.11.2.02.01	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Persentase layanan informasi jasa konstruksi yang tersedia			0		100		100		100		100			
					Penyusunan Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi			-		1		1		1		3			
					Layanan Informasi jasa konstruksi Kab.Tegal pada sistem informasi pembinaan jasa konstruksi (SIPJAKI)			-		3		3		3		9			

NO	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	KODE REKENING/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR SASARAN PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN	Catatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanan	2021		2022		2023		2024		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra PD (2024)		Unit Kerja PD	Lokasi
				1.03.11.2.02.02	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi			0		100		100		100		100			
					Penyusunan Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi			-		1		1		1		3			
				1.03.11.2.02.06	Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha			0		100		100		100		100			
					Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha yang tersusun			-		1		1		1		3			
				1.03.11.2.02.08	Penyusunan Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi			0		100		100		100		100			
					Penyusunan Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi			-		1		1		1		3			
					Dokumen AHSP			-		4		4		4		12			
				1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi			0		100		100		100		100			
				1.03.11.2.04.02	Bimbingan Teknis Tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi					100		100		100		100			
					Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi			-		2		2		2		6			
				1.03.11.2.04.03	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib			0		100		100		100		100			

NO	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	KODE REKENING/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN			INDIKATOR SASARAN PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN	Catatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencan	2021		2022		2023		2024		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra PD (2024)		Unit Kerja PD	Lokasi
					Pemanfaatan Jasa Konstruksi															
						Kegiatan pembinaan jasa konstruksi			-		5		5		5		25			
5		Meningkatnya kepatuhan terhadap kesesuaian pemanfaatan ruang untuk pembangunan				Persentase Kepatuhan terhadap Kesesuaian Pemanfaatan Ruang untuk Pembangunan														
			1.03.12	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang		Rasio Kepatuhan terhadap ITR yang diajukan			87,00	575.000	88,00	600.000	89,00	625.000	90,00	625.000	90,00	2.425.000	DPU	
				1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/ Kota				387.000		400.000		425.000		425.000					
				1.03.12.2.01.01	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/ Kota			387.000												
						Dokumen RTRW														
						Koordinasi														
						Sosialisasi														
				1.03.12.2.01.02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/ Kota						400.000		425.000		425.000					
						Dokumen RTRR														
						Koordinasi														
						Sosialisasi														
				1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/ Kota	Tercapainya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Rencana Tata Ruang					100.000		100.000		100.000					
				1.03.12.2.02.0	Koordinasi dan Sinkronisasi						50.000		30.000		30.000					

NO	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	KODE REKENING/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR TUJUAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN	Catatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencan	2021		2022		2023		2024		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra PD (2024)	Unit Kerja PD	Lokasi
				1	Penyusunan RRTR Kabupaten/ Kota													
						Koordinasi												
						Sosialisasi												
				1.03.12 .2.02.0 2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/ Kota					30.000		30.000		30.000				
						Koordinasi												
						Sosialisasi												
				1.03.1 2.2.02. 03	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang					20.000		20.000		20.000				
						Fasilitasi pembentukan komunitas peduli tata ruang dan lomba tentang tata ruang												
				1.03.12 2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/ Kota													
				1.03.12 .2.03.0 1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah													
				1.03.12 .2.03.0 2	Sistem Informasi Pemanfaatan Ruang													
						Pembuatan Simtaru (Sistem Informasi Tata Ruang)												
				1.03.12 2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/ Kota													
				1.03.12 .2.04.0 4	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang							50	30.000	100	30.000			

NO	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	KODE REKENING/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR SASARAN PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN	Catatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanan	2021		2022		2023		2024		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra PD (2024)		Unit Kerja PD	Lokasi
			X.XX.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Dinas Pekerjaan Umum		81,00	100%	16.705.624	100%	16.705.624	100%	16.705.624	100%	16.705.624	100%	66.822.496	DPU	Sekretaris Dinas
			X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah			100%		100%			100%		100%				Kasubbag Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi dan Pelaporan
				X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah		100		100			100		100				
					Dokumen Renstra dan Renja DPU Kab. Tegal			2		1			1		1		7		
					Dokumen RKA-DPA tahunan			2		2			2		2		10		
					Dokumen SPIP			1		1			1		1		5		
					Penyelenggaraan Forum OPD			1		1			1		1		5		
				X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pengendalian dan pelaporan evaluasi kinerja perangkat daerah		100		100			100		100		100		
					Dokumen LKPJ, LPPD, LKjIP, dan SPM Tahunan			4		4			4		4		20		
					Penyelenggaraan Pameran Investasi			1		1			1		1		5		
					Dokumen monitoring dan evaluasi			1		1			1		1		5		
			X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tercapainya administrasi keuangan perangkat daerah			100		100			100		100		100		Kepala Subbag Keuangan
				X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase tersedianya gaji dan tunjangan ASN		100		100			100		100		100		
					Gaji dan Tunjangan ASN			12		12			12		12		60		
				X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase terpenuhinya honorarium PTT		100		100			100		100		100		

NO	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	KODE REKENING/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN			INDIKATOR SASARAN PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN	Catatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencan	2021		2022		2023		2024		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra PD (2024)		Unit Kerja PD	Lokasi
						Honorarium Pegawai Tidak Tetap (PTT)			5		5		5		5		25			
				X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase terlaksananya penatausahaan dan verifikasi keuangan SKPD			100		100		100		100		100			
						SPP/SPM tagihan LS			550		550		550		550		2.750			
						Laporan keuangan dan realisasi anggaran bulanan dan tahunan			13		13		13		13		65			
						Dokumen laporan keuangan semesteran			2		2		2		2		10			
				X.XX.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase tercapainya administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah			100		100		100		100		100			Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian
				X.XX.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase terpenuhinya penatausahaan barang milik daerah pada SKPD			100		100		100		100		100			
						Dokumen laporan aset/BMD			1		1		1		1		5			
						Persentase informasi yang di update di website sesuai UU informasi publik			100		100		100		100		100			
						Up dating informasi di website			12		12		12		12		60			
						Pengelolaan informasi publik dan dokumentasi perangkat daerah			12		12		12		12		60			
				X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tercapainya administrasi kepegawaian perangkat daerah			100		100		100		100		100			Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian
				X.XX.01.2.05.01	Peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik			100		100		100		100		100			
						Mesin absensi pegawai			-		-		1		-		1			
				X.XX.01.2.05.02	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Persentase jumlah pegawai yang mendapatkan pakaian dinas beserta atribut			0		0		100		0		100			

NO	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	KODE REKENING/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN				INDIKATOR TUJUAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN	Catatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencan	2021		2022		2023		2024		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra PD (2024)		Unit Kerja PD	Lokasi
						X.XX.01.2.05.03	Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian														
							kelengkapannya														
							Pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya														
							Persentase pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian yang dilak tepat waktu														
							Penyusunan daftar nominatif														
							Buku Penjagaan Kenaikan Gaji Berkala														
							Buku Penjagaan Kenaikan Pangkat														
							Penyusunan DUK														
							Laporan Penyusunan SKP														
							Pelayanan Kenaikan Gaji Berkala														
							Laporan Usulan Kenaikan Gaji Berkala														
							Laporan Usulan Kenaikan Pangkat														
							Laporan Rekap Absensi Pegawai														
							Laporan Penyelesaian Izin Cuti														
							Layanan administrasi kepegawaian														
						X.XX.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi dan penilaian Kinerja Pegawai														
							Persentase tercapainya monitoring, evaluasi dan penilaian pegawai														
							Dokumen monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai														
							Dokumen pengembangan inovasi														
						X.XX.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi														
							Persentase jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan, pelatihan, bimbingan teknis dan study banding														
							Peserta yang mengikuti														

NO	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	KODE REKENING/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN			INDIKATOR SASARAN PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN	Catatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	2021		2022		2023		2024		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra PD (2024)		Unit Kerja PD	Lokasi
						pendidikan, pelatihan, bimbingan teknis dan study banding														
				X.XX.01.2.04.10	Sosialisasi peraturan perUndang-undangan	Persentase jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi			0		0		100		100		100			
						Jumlah Aparatur yang mengikuti sosialisasi			-		-		5		5		10			
						Dokumen pelaksanaan program Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas			-		-		1		1		2			
			X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase tercapainya administrasi umum perangkat daerah			100		100		100		100		100			Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian
			X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Persentase tersedianya bahan logistik kantor			100		100		100		100		100			
						ATK			1		1		1		1		5			
						Alat listrik dan elektronik			1		1		1		1		5			
						Alat dan bahan pembersih			1		1		1		1		5			
						Pembelian BBM/Gas			15.000		15.000		15.000		15.000		75.000			
						Tabung APAR			5		5		5		5		25			
						Perlengkapan kantor			12		12		12		12		60			
						Peralatan rumah tangga			1		1		1		1		5			
			X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Persentase tersedianya barang cetakan dan penggandaan			100		100		100		100		100			
						Cetak dan jilid			1		1		1		1		1			
						Penggandaan			150.000		190.000		190.000		190.000		870.000			
			X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerUndang-undangan		Persentase tersedianya bahan bacaan dan peraturan perUndang-undangan			100		100		100		100		100			
						Pembayaran langganan surat kabar			12		12		12		12		60			
						pembayaran langganan bahan publikasi			12		12		12		12		60			
			X.XX.0	Pengadaan Barang Milik		Proporsi tersedianya			100		100		100		100		100			Kepala

NO	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	KODE REKONING/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR SASARAN PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN	Catatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencan	2021		2022		2023		2024		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra PD (2024)		Unit Kerja PD	Lokasi	
			1.2.07	Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	barang milik daerah penunjang urusan pemerintah Daerah															Subbag Umum dan Kepegawaian
			X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Persentase Penyediaan Meubeler Dinas			100		100		100		100		100				
					Pembelian Mebel					10		10		10		30				
			X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Proporsi tersedianya peralatan dan mesin lainnya			100		100		100		100		100				
					APAR dry chemical powder 6 kg			-		-		5		5		15				
					Personal komputer			-		-		4		4		12				
					LCD Proyektor			-		-		2		2		6				
					Printer			-		-		3		3		9				
			X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah Daerah			100		100		100		100		100				Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian
			X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			100		100		100		100		100				
					Pembayaran langganan listrik			12		12		12		12		60				
					Pembayaran langganan air			12		12		12		12		60				
					Pembayaran langganan telepon			12		12		12		12		60				
			X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Persentase tersedianya jasa pelayanan umum kantor DPU			100		100		100		100		100				
					Makan dan minum harian pegawai			12		12		12		12		60				
					Makan dan minum rapat			12		12		12		12		60				
					Perjalanan dinas luar daerah			12		12		12		12		60				
			X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah Daerah			100		100		100		100		100				Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian
			X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Persentase cakupan kendaraan dalam kondisi baik			100		100		100		100		100				

NO	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	KODE REKENING/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN				INDIKATOR SASARAN PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN	Catatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencan	2021		2022		2023		2024		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra PD (2024)		Unit Kerja PD	Lokasi
						Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan															
						Pembelian BBM			-		200		200		200		600				
						Pemeliharaan kendaraan roda 2			-		47		47		47		141				
						Pemeliharaan kendaraan roda 4			-		10		10		10		30				
						Pemeliharaan kendaraan roda 3			-		2		2		2		6				
						Pembayaran pajak kendaraan dinas dan operasional			-		57		57		57		171				
				X.XX.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Persentase pengelolaan alat berat dan laboratorium			100		100		100		100		100				
						Operasional/Pemeliharaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium			25		25		25		25		125				
						Operasional dan pemeliharaan alat berat			25		25		25		25		125				
				X.XX.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Persentase cakupan mebel dalam kondisi baik			100		100		100		100		100				
						Pemeliharaan mebel			5		5		5		5		25				
				X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase cakupan peralatan dan mesin dalam kondisi baik			100		100		100		100		100				
						Pemeliharaan komputer			-		15		15		15		45				
						Pemeliharaan printer			-		39		39		39		117				
						Pemeliharaan AC			-		10		10		10		30				
						Pemeliharaan mesin potong rumput			-		6		6		6		18				
				X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase cakupan gedung dalam kondisi baik			100		100		100		100		100				
						Pemeliharaan gedung kantor			7		7		7		7		35				

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Perumusan indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran Perubahan RPJMD dilakukan untuk melihat keterkaitan dan kontribusi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal terhadap pencapaian tujuan dan sasaran Kabupaten Tegal yang tertuang dalam Perubahan RPJMD 2019-2024. Keberadaan indikator sangat penting dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja penyelenggaraan urusan adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum dalam lima tahun mendatang. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja Dinas Pekerjaan Umum selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur Dinas Pekerjaan Umum.

Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran Perubahan RPJMD secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
(Renstra Murni)

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode	Realisasi	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
		2018		2020	2021	2022	2023	
1	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik	62.42	70.02	77.62	85.22	92.82	100.00	100.00
2	Persentase jalan yang memiliki drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5)	14.30	14.30	14.30	14.30	14.30	14.30	14.30
3	Persentase jembatan kabupaten dalam kondisi baik	67.11	73,51	79.91	86.31	92.71	100.00	100.00
4	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	56.39	66.40	74.80	83.20	91.60	100.00	100.00

Keterangan : Target Capaian diperoleh dari Perhitungan Jumlah Capaian Kinerja Program (Program Jalan, Jembatan, Drainase, dan Sumber Daya Air)


Tabel 7.2

Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal yang Mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD (Renstra Terbatas)

No	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD
				2020	2021	2022	2023	2024	
1	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik	%	62.42	70.02	77.62	85.22	92.82	100.00	100.00
2	Persentase jalan yang memiliki drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5)	%	14.30	14.30	14.30	14.30	14.30	14.30	14.30
3	Persentase jembatan kabupaten dalam kondisi baik	%	67.11	73,51	79.91	86.31	92.71	100.00	100.00
4	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	%	56.39	66.40	74.80	83.20	91.60	100.00	100.00
5	Persentase penyedia jasa konstruksi memenuhi standar kualifikasi	%	-	10.00	22.00	38.50	47.00	57.00	57.00

Tabel 7.3
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
(Renstra Perubahan)

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
		2020	2021	2022	2023	2024		
1	Rasio Ketersediaan Jaringan Irigasi pada Daerah Irigasi (DI) Kewenangan Kabupaten	58,86	60,10	61,33	62,57	63,80	63,80	
2	Cakupan Akses Layanan Air Minum	61,09	63,32	65,55	67,77	70,00	70,00	
3	Rasio Ketersediaan Sarpras Persampahan	0,00	80,00	82,00	83,00	85,00	85,00	
4	Cakupan Akses Sanitasi/Air Limbah Domestik	94,37	95,17	95,57	95,97	96,37	96,37	
5	Persentase Ketersediaan Jaringan Drainase Jalan di Ruas Jalan Kewenangan Kabupaten	58,42	61,42	61,79	62,15	62,52	62,52	
6	Rasio Bangunan Negara yang Sesuai Standar Teknis	76,88	78,00	79,12	80,24	81,36	81,36	
7	Rasio Bangunan yang Memiliki IMB	6,50	7,49	8,01	8,57	9,15	9,15	
8	Rasio Bangunan dan Lingkungan yang Tertata	0,00	10,00	60,00	91,11	100	100	
9	Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Mantap	81,11	82,50	84,00	85,50	87,50	87,50	
10	Proporsi Jembatan dalam Kondisi Mantap	88,05	89,50	91,00	92,00	93,00	93,00	
11	Rasio Tenaga Konstruksi yang Terlatih	0,00	60,00	80,00	80,00	80,00	80,00	



12	Rasio kepatuhan terhadap ITR yang diajukan	86,00	87,00	88,00	89,00	90,00	90,00
----	--------------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

BAB VIII

PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) ini merupakan dokumen perencanaan bidang/urusan pekerjaan umum untuk periode 5 (lima) tahun. Perubahan Renstra disusun untuk mengukur kinerja penyelenggaraan bidang/urusan pekerjaan umum dalam kerangka mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Tegal yang telah dispesifikasi dan disepakati dalam Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024.

Sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam Renstra ini telah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis K/L untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional di Kabupaten Tegal. Hal strategis yang harus menjadi komitmen bersama adalah bahwa Renstra Dinas Pekerjaan Umum ini akan menjadi acuan resmi penilaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal. Karena itu, Renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan RKA Dinas Pekerjaan Umum serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Kabupaten Tegal.

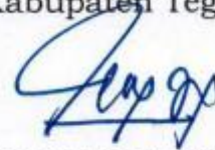
Harus dipastikan bahwa program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA Dinas Pekerjaan Umum merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan bidang/urusan pekerjaan umum dan atau target kinerja sasaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Dinas Pekerjaan Umum yang telah dijabarkan dalam Renja dan RKA Dinas Pekerjaan Umum harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum. LKjIP itu akan menjadi bukti (prove) pencapaian kinerja dan bahan perbaikan (improving) pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum di masa yang akan datang.

Akhirnya, komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja Renstra Dinas Pekerjaan Umum ini.

Slawi, Juni 2021

Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Tegal



Ir. HERY SUHARTONO, M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19630615 199401 1 001